Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah (Tahun 2011 – 2015)

SKRIPSI

Oleh :

Nama : **Nugraheni Debie Susilo**

Nomor Mahasiswa : **13313153**

Jurusan : **Ilmu Ekonomi**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA

2017

Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan

Provinsi Jawa Tengah

(Tahun 2011 - 2015)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar

Sarjana jenjang strata 1

Jurusan Ilmu Ekonomi,

Pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Oleh

Nama : Nugraheni Debie Susilo

Nomor Mahasiswa : 13313153

Jurusan : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA

2017

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh – sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Januari 2017



Nugraheni Debie Susilo

PENGESAHAN

Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan

Provinsi Jawa Tengah

(Tahun 2011 - 2015)

Nama : Nugraheni Debie Susilo

Nomor Mahasiswa : 13313153

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 18 Januari 2017

telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,

Jaka Sriyana, SE, M.Si, Ph.D.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011-2015

Disusun Oleh : **NUGRAHENI DEBIE SUSILO**

Nomor Mahasiswa : **13313153**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Selasa, tanggal: 21 Februari 2017

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D. .....

Penguji : Sahabudin Sidiq, Dr., SE., MA. .....

Sarastri Mumpuni R, Dra., M.Si .....

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Ketika kita mulai bermimpi untuk mendapatkan sesuatu (kesuksesan), dan mimpi itu belum juga terwujud, disitulah letak perjuangan kita dipertanyakan." (penulis)

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua

Orang tuaku

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

*Ass**alamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur atas segala Berkah, Nikmat, Rahmat, Karunia, serta Hidayah yang telah diberikan Allah SubhanahuwaTa'ala Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena hanya dengan Nikmat, Rahmat dan Karunia-Nya jualah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah (Tahun 2011-2015)"**

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana strata (S-1) di bidang Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penulisan skripsi ini bukan semata-mata hasil jerih payah penulis sendiri, akan tetapi juga berkat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak.Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Drs. D. Agus Hardjito, M.Si, Ph.D, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang dengan kebijaksanaannya memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan studi dengan baik
2. Jaka Sriyana, SE, M.Si, Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama proses pembuatan tugas akhir ini.
3. Dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan ilmu yang sangat berarti dan ilmu yang penulis terima akan dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

4. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil serta mendidik, memberi nasehat dan do'a yang tak henti
5. Kedua saudaraku dan sahabatku Edwin, eka dan septi yang selalu memberikan semangat dan dukungan dan motivasi dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
6. Serta rekan-rekan mahasiswa Ekonomi Pembangunan angkatan 2013 yang sama-sama berjuang untuk dapat segera menyelesaiakan skripsi.
7. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis berharap kepada pembaca untuk senantiasa dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif. Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta, pihak-pihak yang memerlukan. Dengan iringan do'a semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT, Amin Yaa Rabal Alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 5 Januari 2017

Nugraheni Debie Susilo

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme ii
Halaman Pengesahan Skripsi iii
Halaman Pengesahan Ujian iv
Halaman Motto dan Persembahan v
Halaman Kata Pengantar vi
Halaman Daftar Isi viii
Halaman Daftar Tabel x
Halaman daftar Gambar xi
Halaman Lampiran xii
Halaman Abstrak xiii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 11
1.3 Tujuan dan Manfaat 12
1.4 sistematika Penulisan 13

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 15
2.1 Kajian Pustaka 15
2.2 Landasan Teori 17
2.2.1 Kemiskinan 17
2.2.2 Upah minimum 24
2.2.3 Tingkat pengangguran 29
2.2.4 Pertumbuhan penduduk 37
2.2.5 Pendidikan 41
2.3 Kerangka Pemikiran 44
2.4 Hipotesis Penelitian 44

BAB III METODE PENELITIAN 46
3.1 Jenis dan Sumber Data 46
3.2 Definisi Operasional Variabel 46
3.3 Metode Analisis 48
3.3.1 Metode Analisis Data Panel 52
3.3.2 Pemilihan Model Data Panel 53
3.3.3 Pengujian Statistik 56

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 59
4.1 Diskripsi Data Penelitian 59
4.2HasildanAnalisis 67
4.2.1 HasilPengujian Data Panel 67
4.2.2 Hasil Pengujian Statistik 69
4.2.3 Interpretasi Hasil dan Pembahasan 74

BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI 80
5.1 Kesimpulan 80
5.2 Implikasi 81

DAFTAR PUSTAKA 83
LAMPIRAN 86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kondisi Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2011 – 2015 2

Table 1.2 Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015 5

Tabel 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Tengah tahun 2011-2015 7

Table 1.4 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015..... 9

Table 1.5 AngkaMelekHurufProvinsiJawa Tengah Tahun 2011-2015 10

Tabel 4.1 Perkembangan Upah Minimum Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah 2011-2015 61

Tabel 4.2 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Tengah tahun 2011-2015 63

Tabel 4.3 Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015 65

Tabel 4.4 Perkembangan Angka Melek Huruf Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015 66

Tabel 4.5 Uji Signifikansi *Fixed Effect* 68

Tabel 4.6 Uji Hausman 69

Tabel 4.7 Hasil Uji Estimasi *Fixed Effect* 70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah 4

Gambar 2.1 Lingkaran setan kemiskinan versi nurske 19

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis 44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Lampiran I Data siap olah menggunakan eviews 87

Lampiran II Uji signifikansi *Fixed Effect*..... 92

Lampiran III Uji Hausman 93

Lampiran IV Hasil estimasi *Fixed Effect* 94

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis seberapa besar pengaruh upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk dan angka melek huruf terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah panel data dengan pendekatan efek tetap (*Fixed Effect*). Data yang digunakan adalah data sekunder 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2011-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel upah minimum, tingkat pengangguran terbuka dan angka melek huruf mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan sedangkan variabel jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah periode 2011- 2015.

Kata Kunci : Upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk, angka melek huruf.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia pembangunan ekonomi merupakan salah satu konsep penting yang diperlukan untuk meningkatkan perekonomian dalam suatu negara. Pembangunan ekonomi merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat (Arsyad,2004). Berdasarkan definisi tentang pembangunan di atas menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi sangat erat hubungannya dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Arsyad (2004) adanya keberhasilan pembangunan ekonomi berdasarkan teori Todaro ditunjukkan oleh tiga hal pokok, yang pertama yaitu dilihat dari perkembangan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, kedua dilihat dari meningkatnya rasa harga diri masyarakat sebagai manusia, dan yang ketiga dapat dilihat dari peningkatan kemampuan masyarakat untuk memilih yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil apabila dalam prosesnya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi sehingga nantinya kegiatan tersebut mampu mendorong meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat yang berguna dalam memenuhi kebutuhan pokok harian mereka.

Di Indonesia adanya pembangunan ekonomi sering dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi oleh hampir semua negara di dunia. Menurut Sukirno (1997) kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum sedangkan menurut Badan Pusat Statistik kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Tabel 1.1

Kondisi Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2011-2015

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata
DKI Jakarta	3,75	3,70	3,72	4,09	3,61	3, 77
Jawa Barat	10,65	9,89	9,61	9,18	9,57	9, 78
Jawa Tengah	15,76	14,98	14,44	13,58	13,32	14, 44
DI Yogyakarta	16,08	15,88	15.03	14,55	13,16	14, 94
Jawa Timur	13,85	13,08	12,73	12,28	12,28	12, 84
Banten	6,32	5,71	5,89	5,51	5,75	5,83
Nasional	12,36	11,66	11,46	10,96	11,13	11, 51

Sumber : BPS RI, Susenas Maret 2015

Tingkat kemiskinan Nasional mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir, pada tahun 2011 tingkat kemiskinan Nasional mencapai angka 12,36% selanjutnya pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi sebesar 11,66%, sedangkan pada dua tahun berikutnya menjadi 11,46 % pada tahun 2013, dan menjadi 10, 96% pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015 mengalami

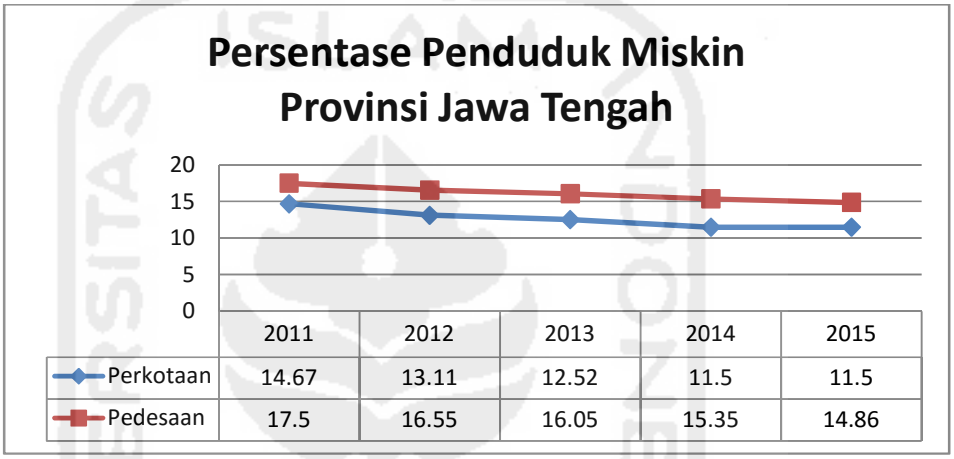
kenaikan lagi menjadi 11,22 %. Berdasarkan data kemiskinan di pulau Jawa, Provinsi Jawa Tengah menempati posisi rata-rata kemiskinan kedua tertinggi setelah Provinsi DI Yogyakarta yaitu dengan rata-rata sebesar 14,44 % selama lima tahun terakhir sedangkan untuk urutan ketiga berada pada Provinsi Jawa Timur dengan rata-rata 12,84 %, dan urutan selanjutnya berada pada Provinsi Jawa Barat sebesar 9,78 % dan DKI Jakarta mempunyai rata-rata tingkat kemiskinan terendah yaitu sebesar 3,77%

Persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren menurun walaupun berfluktuasi dan tidak terlalu signifikan pada perkembangannya, adanya penurunan tingkat kemiskinan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi keberhasilan pembangunan ekonomi. Berdasarkan data kemiskinan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2015), persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011 sebesar 15,76% dan pada tahun 2012 sebesar 14,98% . Pada tahun 2013 hingga 2014 masing-masing sebesar 14,44%, 13,58%, dan pada tahun 2015 mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 13,58 %. Meskipun setiap tahunnya mengalami penurunan jumlah kemiskinan, namun persentase kemiskinan Provinsi Jawa Tengah masih lebih tinggi di banding persentase kemiskinan nasional, sehingga diperlukan usaha keras dari pemerintah dalam penetapan kebijakan berkenaan untuk menekan angka kemiskinan khususnya di Provinsi Jawa Tengah.

Pada negara berkembang khususnya di Indonesia, kemiskinan memiliki penyebaran yang tidak seimbang baik antar negara maupun wilayah. Di Indonesia kemiskinan paling besar terletak di daerah pinggiran yang letaknya jauh dari

pemerintah pusat yang bertindak sebagai pengatur pembangunan, akibatnya daerah pinggiran kurang mendapat perhatian secara maksimal. Masalah kemiskinan yang terjadi akibat tidak meratanya pembangunan dapat mengakibatkan masalah yang serius jika tidak segera diatasi oleh pemerintah.

Gambar 1.1



	2011	2012	2013	2014	2015
Perkotaan	14.67	13.11	12.52	11.5	11.5
Pedesaan	17.5	16.55	16.05	15.35	14.86

Sumber : BPS, Data Informasi Kemiskinan Jawa Tengah 2015

Berdasarkan data kemiskinan BPS (2015), Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, tingkat kemiskinan di daerah pedesaan maupun perkotaan menunjukkan angka penurunan.Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah paling besar didominasi di daerah pedesaan. Pada tahun 2011 kemiskinan di kota sebesar 14,67 % lebih kecil sedangkan untuk daerah pedesaan menunjukkan angka yang lebih besar yaitu sebesar 17,50 % dan pada tahun 2015 tingkat kemiskinan di daerah pedesaan dan perkotaan mengalami penurunan yaitu menjadi 11,5 % untuk daerah perkotaan dan 14,86% untuk daerah pedesaan. Masalah kemiskinan

di daerah pedesaan yang menunjukkan angka lebih besar dari kemiskinan yang terjadi didaerah perkotaan, disebabkan oleh kurangnya akses serta minimnya infrastruktur di daerah pedesaan yang menyebabkan kegiatan perekonomian di wilayah pedesaan menjadi tertinggal dan lebih rendah dibandingkan dengan wilayah perkotaan.

Tabel 1.2

UMP Provinsi Jawa Tengah

Tahun	UMP
2011	Rp. 675.000
2012	Rp. 765.000
2013	Rp. 830.000
2014	Rp.910.000
2015	Rp. 910.000

Sumber: Badan Pusat Statistik RI

Kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor salah satu diantaranya adalah masalah pengupahan. Adanya upah yang rendah yang diterima oleh masyarakat akan berpengaruh pada rendahnya pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu daerah sehingga pendapatan tersebut tidak bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Upah yang rendah dapat disebabkan salah satunya karena adanya perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah secara otomatis akan mempengaruhi tingkat produktivitas masyarakat. Kualitas sumber daya manusia

sering dikaitkan dengan kemampuan serta ketrampilan yang tinggi yang dimiliki oleh masyarakat. Adanya pelatihan serta pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang nantinya kualitas sumber daya manusia tersebut dapat mempengaruhi penentuan besar pendapatan yang diterima masyarakat, apabila faktor ini tidak diperhatikan oleh pemerintah, maka masyarakat miskin akan tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan secara turun temurun.

Tingkat upah minimum Provinsi dijadikan sebagai dasar dalam penetapan upah minimum Kabupaten yang belum bisa menetapkan upah minimum daerahnya. Upah Minimum di Provinsi Jawa Tengah dalam lima tahun terakhir selalu menunjukkan kenaikan setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) . Pada tahun 2011, Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar Rp. 675.000 dan pada tahun berikutnya naik sebesar Rp. 765.000. Pada tahun 2013 sampai tahun 2014 juga mengalami kenaikan yaitu masing-masing sebesar Rp. 830.000 dan Rp. 910.000 pada tahun 2014, walaupun setiap tahunnya mengalami kenaikan, namun adanya ketentuan kenaikan nilai upah minimum ini tetap saja jumlahnya harus di diatas kebutuhan hidup layak masyarakat, ini artinya bahwa adanya kenaikan upah tidak akan berarti jika angka kebutuhan hidup layak masih berkisar di atas jumlah upah minimum.

Tabel 1.3

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah

Tahun	TPT (%)
2011	7,07
2012	5,61
2013	6,01
2014	5,68
2015	4,99

Sumber : BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Jawa Tengah 2015

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan antara lain tingkat pengangguran terbuka. Badan Pusat Statistik mendefinisikan arti pengangguran terbuka merupakan pengangguran yang didasarkan pada konsep seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan pertamakali maupun yang pernah bekerja sebelumnya. Tingkat pengangguran terbuka menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Tingkat pengangguran terbuka merupakan pengangguran jangka pendek yang diperlukan untuk memastikan penyesuaian terhadap fluktuasi ekonomi. Tingkat pengangguran terbuka dapat digunakan sebagai indikator yang paling informatif yang mencerminkan indikasi pasar umum dan kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan yang digunakan sebagai acuan pemerintah dalam pembukaan lapangan kerja baru , untuk itu dalam perkembangannya tingkat pengangguran terbuka dapat

digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian selain angka kemiskinan.

Kaitannya dengan adanya peningkatan jumlah penduduk miskin adalah bahwa adanya pengangguran mengakibatkan masyarakat tidak dapat menerima pendapatan yang nantinya akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan harian mereka, dimana semakin besar pengangguran maka akan mempengaruhi peningkatan penduduk miskin. Di Jawa Tengah pada tahun 2011 tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,07 %. dan pada tahun 2012 meningkat sebesar 5,61% . Pada tahun 2013 kembali naik sebesar 5,61% dan pada tahun 2014 sampai 2015 mengalami penurunan masing-masing sebesar 5,68 %, 4,99%. Walaupun mengalami penurunan pada dua tahun terakhir namun adanya pengangguran harus segera diatasi oleh pemerintah sebelum bertambah serius dan akan berakibat pada peningkatan jumlah kemiskinan.

Faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan adalah adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi tanpa diimbangi dengan perbaikan kualitas penduduk serta peningkatan sumber daya pangan akan menjadikan kemiskinan semakin meningkat. Adanya jumlah penduduk yang tidak terkendali akan menghambat proses pembangunan ekonomi.

Tabel 1.4

Jumlah Penduduk provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015

Tahun	Jumlah Penduduk (Juta)	Pertambahan Penduduk/Tahun (Jiwa)
2011	32, 725	0,87
2012	32, 998	0,84
2013	33,264	0,81
2014	33,522	0,78
2015	33,774	0,75

Sumber : BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Jawa Tengah 2015

Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya mengalami penurunan, ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah dalam menekan jumlah penduduk melalui Keluarga Berencana (KB). Tahun 2011 penduduk Jawa Tengah bertambah 281.492 jiwa dibanding tahun sebelumnya, tahun 2012 pertambahannya menyusut hanya sebanyak 273.314 jiwa, terus menyusut sampai dengan tahun 2015 hanya bertambah 251.478 jiwa. Walaupun menunjukkan angka penurunan dalam penambahan jumlah penduduk, pemerintah tetap harus memberikan upaya terhadap penekanan dalam peningkatan jumlah penduduk agar kedepannya masalah penduduk tersebut tidak akan berdampak pada adanya peningkatan penduduk miskin.

Terkait masalah kemiskinan, kualitas pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya meminimalkan tingkat kemiskinan. Melalui pendidikan diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap penurunan

tingkat kemiskinan, ini dikarenakan kualitas pendidikan dapat memperluas kesempatan kerja masyarakat yang nantinya dapat memberikan dampak berupa peningkatan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan harian.

Tabel 1.5

Angka Melek Huruf Provinsi Jawa Tengah

Tahun	Angka Melek Huruf
2011	**90,34**
2012	**90,45**
2013	**91,71**
2014	**92,98**
2015	**93,12**

Sumber : BPS, Susenas

Kualitas pendidikan suatu wilayah dapat dinilai dari seberapa besar masyarakat yang melek huruf. Semakin besar angka melek huruf di masyarakat suatu wilayah menunjukkan keberhasilan dalam upaya pemerintah terhadap peningkatkan pendidikan di wilayah tersebut. Dari data angka melek huruf Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2011 angka melek huruf sebesar 90,34% dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 90,45 % . Angka tersebut terus meningkat hingga tahun 2015 yaitu sebesar 93,12%. Dengan adanya peningkatan angka melek huruf ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang nantinya mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan fenomena dan fakta di atas, untuk mengetahui sejauh mana masing-masing faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, maka penulis tertarik mengkajinya dalam bentuk penelitian dengan judul **"Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015".**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh tingkat upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah ?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah ?
3. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah ?
4. Bagaimana pengaruh tingkat Angka Melek Huruf (AMH) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah ?
5. Bagaimana pengaruh upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk dan angka melek huruf secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah
2. Menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah
3. Menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah
4. Menganalisis pengaruh Angka Melek Huruf (AMH) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah
5. Menganalisis pengaruh upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk dan angka melek huruf secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah ?

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

   Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Universitas Islam Indonesia.

2. Bagi Instansi Terkait

   Penulis mengadakan penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan memberikan tambahan wawasan bagi pihak- pihak terkait

dengan permasalahan ekonomi berkenaan dengan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

3. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan

   Dapat dijadikan sumbangan pemikiran atau studi banding bagi mahasiswa atau pihak yang melakukan penelitian sejenis.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam setiap karya tulis, sistematika yang baik dan benar sangat dibutuhkan guna kesempurnaan tulisan tersebut. Penulisan skripsi ini sistematika pembahasan terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut :

BAB I.PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang pemilihan obyek penelitian, rumusan masalah serta manfaat dantujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. selain itu di dalam bab ini juga berisi tentang sistematika penulisan .

BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini berisi pendokumentasian dan pengkajian hasil penelitian-penelitian yang pernah dilakukan serta berisi landasan teori yang akan digunakan dalam mendukung penelitiannya. Selain itu juga berisi kerangka pemikiran atau alur penelitian dan hipotesis penelitian

BAB III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan penjelasan tentang berbagai variable yang digunakan dalam penelitian, serta berisi tentang suatu pembahasan mengenai

model analisis penelitian dan jenis-jenis data beserta sumber data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV. HASIL DAN ANALISA

Dalam bab ini berisi semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian dan analisa statistic.

BAB V. SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Dalam bab yang terakhir ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari analisa yang dilakukan dan implikasi ini muncul sebagai hasil simpulan. Selain itu juga berisi saran serta rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait apabila ditemukan berbagai permasalahan yang berkenaan dengan penelitian

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1.1 Kajian Pustaka

Wardani (2013) meneliti menggunakan data sekunder dari 35 Kab/Kota di Jawa Tengah tahun 2006 - 2010. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi berganda data panel dengan metode GLS serta model *Fixed Effect* . Dalam penelitian tersebut menggunakan variabel tingkat pengangguran, pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk sebagai variabel independen dan kemiskinan sebagai variabel dependen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Pengeluaran pemerintah negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Secara simultan Pengangguran, pengeluaran pemerintah, dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap kemiskinan.

Mustika (2011) meneliti menggunakan metode analisis kuantitatif regresi linear berganda dengan memperlakukan jumlah penduduk miskin sebagai variabel terikat, sedangkan petumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk sebagai variabel bebas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDB dan variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan

dan kedua variabel independen secara bersamaan mempengaruhi variabel dependen (tingkat kemiskinan)

Riva, dkk (2014). meneliti menggunakan data sekunder dengan menggunakan data tahunan jumlah penduduk miskin, UMP dan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Riau tahun 2002-2011, dengan menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau, sedangkan pada variabel upah minimum berpengaruh signifkan dan mempunyai hubungan negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau.

Dalam proses analisis menunjukkan bahwa pengangguran terbuka dan upah minimum provinsi secara bersama-sama mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Riau.

Dores (2014) meneliti menggunakan data sekunder 19 Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat. Data diolah dengan bantuan Software SPSS dengan menggunakan alat analisis Regresi Linear Berganda , yang digunakan untuk melihat pengaruh angka melek huruf dan angka harapan hidup terhadap jumlah penduduk miskin.

Dalam proses analisis dapat disimpulkan bahwa bahwa angka harapan hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin sedangkan angka melek huruf berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di propinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil

penelitian angka melek huruf dan kesehatan berpengaruh terhadap penurunan jumlah penduduk, untuk itu diharapkan dalam mengurangi jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatra Barat sangat diperlukan peran pemerintah secara aktif yaitu dengan cara meningkatkan kesehatan masyarakat serta mutu pendidikan (angka melek huruf) agar tidak ada lagi masyarakat di Provinsi Sumatra Barat yang tidak bisa baca tulis sehingga akan berdampak pada penurunan kemiskinan

1.2 Landasan Teori

1.2.1 Kemiskinan

Menurut BPS kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengluaran. Sedangkan kemiskinan menurut Kuncoro (1997) merupakan suatu kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Semua ukuran kemiskinan dipertimbangkan berdasarkan pada suatu norma tertentu terutama dalam pengukuran kemiskinan yang berdasarkan atas konsumsi. Garis kemiskinan yang didasarkan oleh pola konsumsi didasarkan pada dua elemen diantaranya:

1. Pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi standar gizi minimum dan kebutuhan dasar lainnya.
2. Jumlah kebutuhan lain sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

2.2.1.1 Penyebab kemiskinan

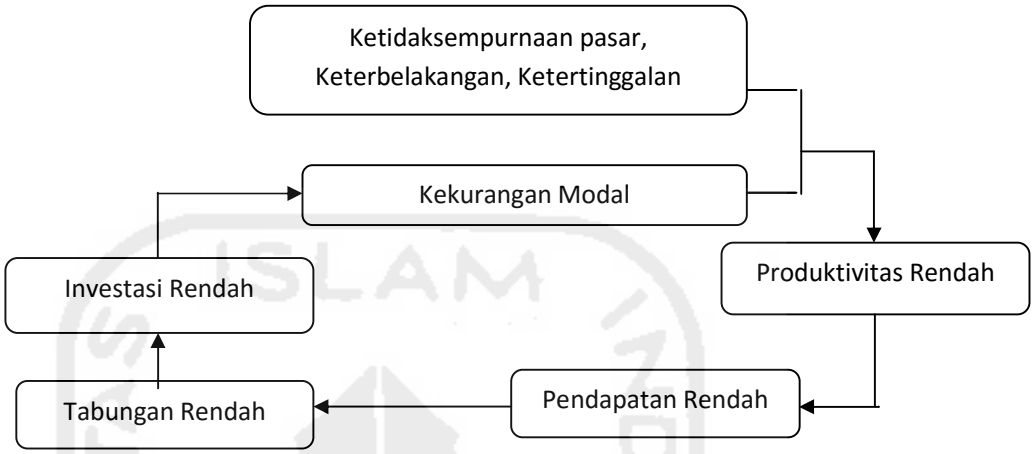
Kuncoro (1997) Adanya kemiskinan merupakan suatu masalah yang sangat kompleks, adapun sebab-sebabnya :

1. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Dengan kata lain penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah yang pada akhirnya akan mengakibatkan perolehan upah yang rendah. Keadaan rendahnya kualitas sumber daya manusia ini diakibatkan oleh rendahnya tingkat pendidikan di kalangan masyarakat penduduk miskin, di samping itu ada faktor lainnya yaitu nasib yang kurang beruntung,adanya diskriminasi, atau karena keturunan
3. Perbedaan akses dalam modal.

   Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan :

Gambar 2.1

Lingkaran setan Kemiskinan Versi Nurske



Sumber : Mudrajad Kuncoro, 1997

Dilihat dari Gambar 2.1 bahwa apabila kemiskinan terjadi maka akan menyebabkan adanya ketidaksempurnaan dalam mekanisme pasar kondisi ini seperti ditandai dengan adanya ketertinggalan dan keterbelakangan. Jika hal ini terjadi maka akan berpengaruh pada produktivitas yang rendah yang nantinya akan berdampak pada rendahnya pendapatan yang diperoleh masyarakat. Kemudian dari kondisi pendapatan yang rendah maka akan berpengaruh pada tingkat tabungan yang rendah pula, ini dikarenakan masyarakat yang mempunyai pendapatan rendah dan tidak mempunyai uang untuk disimpan. Dampak selanjutnya akan menyebabkan angka tingkat investasi rendah sehingga akan kekurangan dalam hal permodalan sehingga akan mengalami kondisi seperti semula.

2.2.1.2 Ukuran Kemiskinan

Arsyad (2004) mendefinisikan kemiskinan merupakan masalah yang multidimensional, dalam pengukurannya terdapat dua macam cara untuk mengukur kemiskinan yaitu kemiskinan absolute dan ukuran kemiskinan relative :

1. Kemiskinan absolute,

   yaitu suatu ukuran yang mengkaitkan kemiskinan dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Apabila pendapatan tidak mencapai kebutuhan minimum , maka orang dapat dikatakan miskin. Kesulitan utama dalam konsep pengukuran kemiskinan secara absolute adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena keduanya tidak hanya di pengaruhi oleh factor adat istiadat saja melainkan juga diakibatkan oleh iklim,tingkat kemajuan suatu Negara dan berbagai factor ekonomi lainnya.

2. Kemiskinan Relatif

   Dalam konsep pengukuran ini, kemiskinan terjadi ketika seseorang mempunyai pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakatsekitarnya. Dengan kata lain kemiskinan relative diukur berdasarkan keadaan lingkungan sekitarnya.

   Berdasarkan konsep kemiskinan relatif, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah, sehingga konsep ini merupakan perbaikan dari konsep kemiskinan absolute.

2.2.1.3. Indikator Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik, terdapat beberapa indikator dalam mengukur kemiskinan antara lain :

1. Head Count Index (HCI - P0) yaitu persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK)
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
3. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
4. Foster-Greer-Thorbecke/FGT (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu :

$$P\alpha = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left[\frac{Z-Yi}{Z}\right]^{\alpha}k$$

Dimana, α= 0,1,2, dan z =garis kemiskian, Yi = rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ..., q), Yi < z, sedangkan q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, dan n = Jumlah Penduduk. Jika α = 0 maka diperoleh Head Count Index (P0); jika α =1 diperoleh Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index P1dan α = 2 adalah Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index P2)

2.2.1.4 Kebijakan dalam Mengurangi Kemiskinan

Dalam usaha menurunkan tingkat kemiskinan Arsyad (2004) menyebutkan ada beberapa hal yang dapat dilakukan, antara lain :

1. Pembangunan Pertanian

Sektor pertanian mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan. Kontribusi terbesar bagi peningkatan pendapatan pedesaan dan pengurangan kemiskinan pedesaan dihasilkan dari adanya revolusi teknologi dalam pertanian padi, termasuk dalam pembangunan irigasi.

2. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan, dan gizi) merupakan alat kebijakan penting dalam stategi pemerintah secara keseluruhan untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan penduduk indonesia. Perluasan ruang lingkup dan kualitas dari pelayanan-pelayanan pokok tersebut membutuhkan investasi modal insani yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas golongan miskin.

Di indonesia adanya pendidikan sangat berperan penting dalam pengurangan kemiskinan jangka panjang, baik secara tidak langsung melalui perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum, maupun secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan mereka.

Disamping pendidikan perbaikan kesehatan dari pemerintah merupakan suatu alat kebijakan untuk mengurangi kemiskinan. Ada tiga faktor utama yang mendasari kebijakan ini :

a. Berkurangnya beban penderitaan secara langsung memuaskan kebutuhan konsumsi pokok juga merupakan tujuan kebijaksanaan sosial yang sangat penting.
b. Perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas golongan miskin karena dengan kondisi kesehatan yang baik akan meningkatkan daya kerja.
c. Menurunkan tingkat kematian bayi dan anak-anak secara tak langsung juga berperan dalam mengurangi kemiskinan yakni mengurangi tingkat kesuburan, tingkat kematian yang semakin rendah tidak saja membantu para orang tua untuk mencapai jumlah keluarga yang mereka inginkan, tetapi juga membuat mereka menginginkan keluarga yang lebih kecil.

3. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat

LSM bisa memainkan peran yang lebih besar di dalam perancangan dan implementasi program pengurangan kemiskinan. Karena fleksibilitas dan pengetahuan mereka tentang komunitas yang mereka bina, LSM untuk beberapa hal bisa menjangkau golongan miskin tersebut secara efektif ketimbang program-program pemerintah. Adanya keterlibatan secara aktif LSM di dalam program-program pemerintah cenderung untuk meningkatkan penerimaan masyarakat pedesaan terhadap program-program pemerintahdan oleh karena itu pada

kahirnya akan meningkatkan paangka partisipasi masyarakat. Dengan keterlibatan LSM dapat meringankan biaya finansial dan staf dalam mengimplementasikan program padat karya untuk mengurangi kemiskinan.

2.2.2 Upah Minimum

2.2.2.1 Teori Upah

Menurut Sumarsono (2003) upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pkerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. Upah Minimum sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 8/1981 merupakan upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional,maupun Sub sektoral. Teori yang mendasari sistem pengupahan disuatu negara didasarkan pada :

1. Teori upah menurut nilai pertentangan kelas

Dalam teori ini Karl Marx berpendapat bahwa hanya buruh yang merupakan sumber nilai dari jasa buruh atau dari jumlah waktu kerja yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Sistem pengupahan dan pelaksanannya berdasarkan pandangan Karl Marx adalah sebagai berikut :

a. Kebutuhan konsumsi tiap-tiap orang macam dan jumlahnya hampir sama. Nilai (harga) setiap barang hampir sama, maka upah tiap-tiap orang kira-kira sama.
b. Sistem pengupahan tidak memberikan intensif yang sangat perlu untuk menjamin peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional
c. Sistem kontrol yang sangat ketat diperlukan untuk menjamin setiap orang betul-betul mau bekerja menurut kemampuannya.

Namun dalam kenyataannya sistem pengupahan ini dikatakan hanya terdapat pada masyarakat impian , karena dalam sistem ini banyak faktor-faktor yang tidak diperhitungkan sehingga tidak mungkin sistem ini dijalankan secara murni.

2. Teori upah menurut pertambahan produk marginal

Teori Neo Klasik mengemukakan bahwa dalam rangka memaksimumkan keuntungan tiap-tiap pengusaha menggunakan faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga tiapn faktor industri yang dipergunakan menerima atai diberi imbalan sebesar nilai pertambahan hasil margimal dari faktor produksi tersebut. Pengusaha memperkerjakan sejumlah karyawan sedemikian rupa sehingga nilai pertambahan hasil marginal seseorang sama dengan nilai upah yang diterima orang tersebut. Tngkat upah yang dibayarkan pengusaha adalah sebagai berikut :

$$W = WMPPL = MPPL \times P$$

Dimana W = tingkat upah yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan, P = harga jual barang dalam rupiah per unit barang, WMPPL = pertambahan

marginal pekerja diukur dalam unit barang per unit waktu, dan MPPL = nilai pertambahan hasil marginal pekerja atau karyawan.

Menurut teori Neo Klasik karyawan memperoleh upah senilai dengan hasil marginalnya. Untuk memksimumkan keuntungan pengusaha memberikan imbalan kepada setiap faktor produksi sebesar nilai pertambahan hasil marginal masing-masing faktor produksi tersebut.

Pengupahan di Indonesia pada umumnya di dasarkan pada tiga fungsi upah, yaitu antara lain :

a. Menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya.
b. Mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang
c. Menyediakan intensif untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja

2.2.2.2 Mekanisme Penetapan Upah Minimum

Berdasarkan Permenaker No.17 Tahun 2005 dan perubahan revisi KHL dalam Permenaker No.13 Tahun 2012 terdapat lima faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan upah minimum :

1. Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

   Menurut Kepmenakertrans No. 13 Tahun 2012 tentang komponen dan pentahapan dan pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL), terdapat standar KHL yangterdiri dari 7 kelompok dan 60 komponen kebutuhan yaitu :

   a. Makanan dan minuman (11 komponen)
   b. Sandang (13 komponen)

c. Perumahan (26 komponen)

d. Pendidikan (2 komponen)

e. Transportasi (1 komponen)

f. Rekreasi dan tabungan (2 komponen)

Melalui komponen kebutuhan tersebut kemudian Dewan Pengupahan Provinsi dan Kbupaten melakukan survey harga yang dilakukan secara berkala untuk menentukan nilai KHL.Apabila kebijaka pemerintah sebatas mempertahankan nilai rill upah minimum, maka persentase kenaikan upah minimum ditetapkan sama dengan persentase kenaikan nilai KHL.

2. Produktivitas Makro

Produktivitas makro suatu Negara atau daerah dicerminkan dari pendapatan perkapita.Kondisi pengupahan yang ideal adalah apabila nilai ipah minimum seimbang dengan nilai pendapatan perkapita di suatu daerah.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan perkembangan ekonomi suatu Negara atau daerah. Pertumbuhan ekonomiyang tinggi akan mendorong aktivitas ekonomiyang tinggi pula. Jumlah uang beredar yang naik dlam masyarakat karena adanya aktivitas ekonomi kan berdampak pada munculnya inflasi, adanya inflasi dapat mempengaruhi upah rill yang diterima pekerja. Apabila kemampuan daya beli rill yang diperoleh dari upah yang diterima dari upah yang

diterimanya tidak semakin menunjukkan penurunan, maka dari itu penentuan upah minimum mempertimbangkan tingkat inflasi serta faktor-faktornya yang mempengaruhinya.

4. Kondisi Pasar Kerja

Seringkali terjadi kondisi dimana penambahan angkatan kerja baru tidak dapat diserap pasar seluruhnya, hal inilah yang menyebabkan pengangguran bertambah. Tingkat upah yang semakin naik maka terdapat kemungkinan kemampuan pengusaha dalam menyediakan lowongan kerja akan cenderung menurun. Hal ini disebabkan karena tidak semua pengusaha memiliki kemampuan membayar upah yang naik terus, karena kemampuan pengusaha juga ditentukan oleh faktor-faktor lainnya seperti kondisi pasar barang dan pasar uang, oleh karena itu pemerintah dalam menentukan kenaikan upah minimum berusaha keras untuk mempertimbangkan agar keputusannya tidak membatasi lapangan kerja yang ada dan menambah jumlah pengangguran yang cukup tinggi.

5. Kondisi usaha yang paling tidak mampu (marginal)

Upah merupakan pembayaran pengusaha terhadap pemberi jasa yaitu pekerja. Tidak semua pengusaha memiliki kemampuan tinggi dalam pembayaran upah, sehingga tidak serta merta jika terjadi kenaikan upah minimum sekalipun pengusaha tersebut mampu membayar upah yang telah ditetapkan, usaha pengusaha seperti itulah yang dinamakan usaha marginal tidak mampu. Agar penetapan upah

minimum tidak menjadikan usaha marginal gulung tikar, maka pemerintah dalam menetapkan tingkat upah minimum juga mempertimbangkan nasib usaha marginal.

2.2.2.1 Hubungan upah minimum dengan kemiskinan

Upah minimum merupakan suatu imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan (Sumarsono, 2003). Dalam kenyataannya adanya kebijakan upah minimum diberlakukan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan serta untuk meningkatkan kehidupan yang layak khususnya bagi para pekerja. Sehigga dengan adanya kenaikan upah minimum dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Yanthi dan Marhaeni (2015) menyebutkan bahwa kesejahteraan buruh /pekerja disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan buruh/pekerja sehingga tingkat kesejahteraan buruh/pekerja tersebut meningkat, Kenaikan upah akan menguntungkan pihak buruh/pekerja dan pengusaha karena adanya produktivitas kerja yang meningkat dan pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

2.2.3 Tingkat Pengangguran

Sukirno (2011) menyebutkan bahwa pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Faktor utama yang

menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengluaran agregat. Pengluaran agregat yang terwujud dalam perekonomian adalah lebih rendah dari pengluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Di samping itu faktor-faktor lain yang menimbulkan pengangguran adalah :

1. Menganggur karena ingin mencari kerja lain yang lebih baik
2. Pengusaha menggunakan peralatan produksi modern yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, dan
3. Ketidaksesuaian di antara keterampilan pekerja yang sebenarnya dengan keterampilan yang diperlukan dalam industri-industri.

2.2.3.1 Jenis Pengangguran

Menurut Sumarsono (2003) pengangguran terjadi karena ketidaksesuaian antara permintaan dan penyediaan dalam pasar kerja. Adapun bentuk-bentuk pengangguran sebagai berikut :

1. Pengangguran Normal atau Friksional

   Pengangguran normal atau friksional bukan merupakan pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja yang ada. Kesulitan ini dapat terbentuk karena adanya :

   a. Tenggang waktu yang diperlukan dalam proses pelamaran dan seleksi, atau terjadi karena factor jarak atau kurangnya informasi.

b. Kurangnya mobilitas pencari kerja dimana lowongan pekerjaan justru terdapat bukan di sekitar tempat tinggal si pencari kerja.

c. Pencari kerja tidak mengetahui dimana adanya lowongan pekerjaan dan demikian pula pengusaha tidak mengetahui dimana tersedianya tenaga-tenaga yang sesuai.

2. Pengangguran Musiman.

   Pengangguran musian adalah pengangguran yang terjadi karena pergantian musim.Kegiatan ekonomi masyarakat sering kali terpengaruh oleh irama musim.Ada musim giat sehingga banyak permintaan tenaga kerja dan ada masa-masa dimana kegiatan mengendur.Pergantian antara giat dan kendur terjadi secara teratur setiap tahun. Selama kegiatan mengendur terjadi pengangguran yang akan terpecahkan secara otomatis bila tiba masa giat kembali.

3. Pengangguran Siklikal, yaitu pengangguran yang terjadi dikarenakan suatu keadaan dimana pengusaha kehilangan kepercayaan terhadap peluang di masa depan, sehingga sikap pesimisme yang timbul membawa dampak negatif pada kesempatan kerja yang mengakibatkan naiknya tingkat pengangguran.

4. Pengangguran Struktural , yaitu pengangguran yang terjadi karena perubahan dalam struktur atau komposisi perekonomian. Adanya perubahan dalam struktur yang demikian memerlukan perubahan dalam ketrampilan tenaga kerja yang dibutuhkan, sedangkan pihak

pencari kerja tidak mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan baru tersebut.

5. Pengangguran Teknologi

   Dalam pertumbuhan industri adanya teknologi yang dipakai dalam proses produksi selalu berubah-ubah. Perubahan teknologi ini membawa dampak kesempatan kerja ke segala arah. Kekuatan substitutif dan kekuatan merombak spesifikasi jabatan yang ditimbulkan membawa dampak negatif bagi kesempatan kerja berupa pengangguran.

6. Pengangguran karena kurangnya permintaan agregat

   Permintaan total masyarakat merupakan dasar untuk diadakannya kegiatan invesrasi. Pengluaran investasi dapat memberikan peluang untuk tumbuhnya kesempatan kerja.

Sedangkan berdasarkan dimensinya Edwards (dikutip dari Arsyad, 2004) membedakan lima bentuk pengangguran yaitu:

1. Pengangguran terbuka, yaitu mereka yang bekerja secara sukarela (mereka yang tidak mau bekerjakarenamengharapkan pekerjaan yang lebih baik) maupun secara terpaksa (mereka yang mau bekerja tetapi tidakmemperoleh pekerjaan)
2. Setengah menganggur, yaitu mereka yang bekerja lamanya (hari, minggu, musiman) kurang dari yang mereka bisa kerjakan

3. Tampaknya bekerja tetapi tidak secara penuh: yaitu mereka yang tidak digolongkan sebagai pengangguran terbuka dan setengah menganggur, yang dimaksudkan disini adalah:
    a. Pengangguran tak kentara (*disguised unemployment)* misalnya para petani yang bekerja diladang selama sehari penu, padahal pekerjaan itu sebenarnya tidak memerlukan waktu sehari penuh.
    b. Pengangguran tersembunyi (*Hidden unemployment*) misalnya orang yang bekerja tidak sesuai dengan tingkat atau jenis pendidikannya.
    c. Pensiun lebih awal, ini biasanya terjadi pada pegawai pemerintah
    d. Tenaga kerja yang lemah, yaitu mereka yang mungkin bekerja *Full time,* tetapi intensitasnya lemah karena kurang gizi atau penyakitan .
    e. Tenaga kerja yang tidak produktif, yaitu mereka yang mampu bekerja secara produktif, tetapi karena kurangnya sumber daya penolong yang memadai maka mereka tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik.

2.2.3.2 Dampak Pengangguran

Feriyanto (2014) menyebutkan ada beberapadampakyang ditimbulkan akibat adanya pengangguran antara lain :

1. Dampak pengangguran terhadap perekonomian
    a. Pengangguran dapat menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimumkan pendapatan nasional yang sebenarnya dicapai lebih rendah daripada pendapatan nasional potensional.
    b. Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak (tax revenue) pemerintah berkurang

c. Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi

2. Dampak pengangguran bagi individu atau masyarakat

   a. Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan

   b. Pengangguran menyebabkan kehilangan ketrampilan

   c. Pengangguran menyebabkan ketidak stabilan politik

   d. Pengangguran dapat menyebabkan timbulnya penyakit sosial masyarakat

2.2.3.3 Kebijakan Penanganan Pengangguran

Pengangguran merupakan suatu masalah yang dapat mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat dikarenakan adanya pengangguran dapat mengurangi pendapatan yang diperoleh untuk digunakan dalam mencukupi kebutuhan hidup. Menurut Sumarsono (2003) masalah pengangguran mempunyai pemecahan yang berbeda-beda tergantung dari bentuk permasalahannya :

1. Pengangguran Friksional, ditinjau dari deskripsi permasalahan maka inti persoalan pengangguran jenis ini teletak pada hambatan aliran informasi antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Oleh sebab itu penanganannya harus berupa usaha untuk mengintensifikasi dan mengekstensifkan informasi. Intensif agar informasi disebarkan dalam jumlah yang cukup. Penyebaran secara ekstensif dimaksudkan agar menjangkau lokasi geografis seluas mungkin, agar cepat diketahui oleh yang bersangkutan untuk mempercepat bertemunya permintaan

dan penawaran kerja. Untuk itu peran surat kabar, majalah, atau selebaran yang lain perlu di optimalkan fungsinya.

2. Pengangguran musiman, masalah yang timbul dalam dimensi musiman ini adalah saat- saat dimana sedang terjadi *off-season,* salah satu alternatif pemecahannya adalah mengembangkan jenis-jenis kegiatan yang bersifat *off-Farm* atau *non-farm*di daerah pedesaan dimana irama musiman sudah suatu yang rutin. Bagi pengusaha lokal dapat menentukan bentuk dari kegiatan *off-farm* tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk mengikat penduduk desa yang bersangkutan sehingga kemajuan dan keberhasilan mereka dapat berdampak positif bagi pengembangan dasarnya.
3. Pengangguran Siklikal, untuk menanggulangi masalah pengangguran ini diperlukan kebijakan anti siklikal, biasanya berbentuk kebijakan moneter maupun fiskal. Kebijakan moneter dapat berupa memperluas uang yang beredar pada saat terjadi resesidan mengurangi jumlah uang beredar pada saat ekspansi berlebihan. Setrta dengan menurunkan tingkan bunga pinjaman yang dapat mempermudah bagi pengusaha dalam memperoleh modal untuk berusaha sehingga akan meningkatkan investasi yang akan berdampak pada peningkatan permintaan tenaga kerja.
4. Pengangguran struktural dan teknologi

   Masalah yang dihadapi berkenaan dengan masalah pengangguran jenis ini adalah kurangnya keterampilan yang dimiliki pekerja.

Pemecahannya dengan cara pengarahan pada program pelatihan yang efektif.

5. Pengangguran karena kurangnya permintaan agregat, inti masalah dalam pengangguran jenis ini adalah lesunya berkenaan dengan kegiatan ekonomi, maka untuk menghidupkan kembali kegiatan ekinomi ini diperlukan adanya investasi dengan skala besar untuk menghidupkan permintaan agregat.

2.2.3.4 Hubungan pengangguran dengan kemiskinan

Dalam teori pembanguan, pengangguran sangat dikaitkan dengan masalah ketanagakerjaan. Adanya pengangguran mengakibatkan berbagai masalah salah satunya yaitu masalah kemiskinan. Seseorang yang mengalami pengangguran akan berakibat pada penurunan sumber pendapatan yang berakibat pada keterbatasan ekonomi di kalangan masyarakat. Adanya keterbatasan ekonomi akan menyebabkan masyarakat tidak bisa mencukupi kebutuhan minimum harian,dengan kata lain akan kondisi ini akan menyebabkan kemiskinan.

Sukirno (2011) mengemukakan bahwa salah satu faktor penting yang mentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat diwujudkan. Adanya pengangguran akan mengurangi pendapatan masyarakat, dan ini akan mengurangi tingkat kemakmuran.

2.2.4 Pertumbuhan Penduduk

Menurut BPS penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Di indonesia khususnya pada negara yang sedang berkembang masalah pertumbuhan penduduk merupakan penghambat pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarkat, ini di karenakan adanya peningkatan pertumbuhan penduduk akan menambah jumlah tenaaga kerja sedangkan kemampuan negara berkembang dalam menciptakan lapangan kerja baru sangat terbatas. Hal inilah yang menyebabkan masalah rendahnya pendapatan yang diterima masyarakat yang berakibat pada penurunan kesejahteraan masyarakat.

Jumlah penduduk yang terkendali terjadi apabila jumlah kelahiran seimbang dengan jumlah kematian. Adanya penekanan berkenaan dengan peningkatan jumlah penduduk akan menyebabkan pembanguan ekonomi menjadi lebih baik. Kenaikan jumlah penduduk setidaknya harus diimbangi dengan adanya peningkatan kualitas penduduk hal ini dicerminkan dengan adanya peningkatan fungsi pendidikan, ini dimaksudkan untuk memperluas kesempatan kerja yang berguna untuk meningkatkan pendapatan perkapita penduduk. Selain itu peningkatan fungsi kesehatan juga harus dimaksimalkan. Tentunya semua itu tidak lepas dari fungsi pembangunan. Adanya pemerataan pembangunan berkenaan dengan perbaikan fasilitas dan infrastruktur penunjang juga diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar dengan adanya peningkatan penduduk akan

menyebabkan kenaikan produktivitasnya juga, sehingga adanya peningkatan penduduk tidak akan berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat

Arsyad (2004) mengemukakan bahwa ada tiga ciri pokok yang menandai perkembangan dan permasalahan kependudukan Indonesia yaitu, laju pertumbuhan penduduk yang masih perlu diturunkan, penyebaran penduduk yang kurang seimbang antar daerah, serta kualitas kehidupan penduduk yang perlu ditingkatkan.

2.2.4.1 Teori Kependudukan

1.Perangkap Penduduk Malthus

Pada tahun 1798 Reverend Thomas Malthus Mengemukakan hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Teori ini berisikan bahwa kecenderungan umum penduduk suatu negara untuk tumbuh menurut deret ukur, yaitu menjadi dua-kali lipatnya setiap 30-40 tahun.sementara itu pada saat yang sama, karena hasil yang menurun dari faktor produksi tanah, persediaan pangan hanya tumbuh menurut deret hitung (Arsyad, 2004). Oleh sebab itu pertumbuhan persediaan pangan tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan tinggi yang mengakibatkan pendapatan perkapita (dalam masyarakat tani didefinisikan sebagai produksi pangan perkapita) akan cenderung mengalami penurunan menjadi sangat rendah selanjutnya akan menyebabkan pertumbuhan penduduk tidak stabil atau hanya sedikit di atas tingkat subsisten.

Malthus berkeyakinan bahwa satu-satunya cara untuk menghapuskan tingkat kehidupan yang rendah atai kemiskinan absolut dengan menganjurkan

masyarakat untuk menahan hawa nafsu dan memnatasi jumlah keturunannya. Namun karena teori ini didasarkan atas asumsi-asumsi dan hipotesa-hipotesa yang sederhana dan tidak berdasarkan pada uji verifikasi secara empiris , adanya pendapat Malthus terdapat banyak kritik antara lain :

a. Teori ini tidak memperhitungkan peranan dan dampak dari kemajuan teknologi
b. Teori ini berdasarkan hipotesa tentang hubungan secara makro antara pertumbuhan penduduk dan tingkat pendapatan perkapita tanpa dibuktikan dengan uji empiris
c. Teori ini merupakan teori yang salah yaitu berpendapat bahwa pendapatan perkapita sebagai faktor penentu utama tingkat pertumbuhan penduduk. Suatu pendekatan yang lebih baik untuk masalah penduduk dan pembangunan adalah terpusat pada ekonomi mikro dari mulai proses pembuatan keputusan ukuran kluarga dari masing-masing individual dan tingkat kehidupan menjadi faktor penentu utama dari keputusan kluarga apakah akan mempunyai banyak atau sedikit anak.

2. Teori Transisi Kependudukan

Teori ini berusaha untuk menjelaskan 3 tahap dalam sejarah kependudukan modern antara lain :

a. Tahap I yaitu sebelum terjadi moderenisasi perekonomian negara mengalami pertumbuhan penduduk yang lambat sekali sebagai akibat dari tingginya tingkat kelahiran yang hampir sama dengan tingkat kematian.

b. Tahap II ketika mulai terjadi moderenisasi, perbaikan akan kesehatan masyarakat, pendapatan yang lebih tinggi, dan kualitas makanan yang lebih baik menyebabkan penurunan tingkat kematian dan perlahan-lahan menaikkan tingkat harapan hidup dari bawah 40 tahun menjadi lebih dari 60 tahun. Penurunan tingkat kematian tidak secara langsung diikuti oleh penurunan angka kelahiran mengakibatkan perbedaan pertumbuhan antara tingkat kelahiran yang tinggi dan tingkat kematian yan rendah berakibat pada pertumbuhan penduduk menjadi sangat tinggi dibandingkan abad-abad sebelumnya. Di tahap II ini menandai dimulainya transisi kependudukan yaitu transisi dari jumlah penduduk yang stabil dan lambat ke pertumbuhan yang cepat.
c. Pada tahap III terjadi pada saat kekuatan dan pengaruh moderenisasi dan pembangunan menyebabkan tingkat kelahiran menurun seimbang dengan tingkat kemtian sehingga pertumbuhan penduduk kecil sekali atau bahkan tidak tumbuh sama sekali.

2.2.4.2 Hubungan Pertumbuhan Penduduk dengan Kemiskinan

Dalam teori perangkap penduduk Malthus. Kemiskinan disebabkan karena adanya perbedaan proporsi antara pertumbuhan persediaan pangan dengan pertumbuhan penduduk yang menyebabkan pendapatan perkapita (dalam masyarakat tani didefinisikan sebagai produksi pangan per kapita) akan cenderung turun menjadi sangat rendah yang menyebabkan jumlah penduduk tidak pernah stabil atau hanya sedikit diatas tingkat subsisten

Menurut Maier di kutip dari Kuncoro (1997), jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan permasalahan mendasar. Karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat.

2.2.5 Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hak yang dimiliki masyarakat untuk belajar yang nantinya dapat berguna dalam meningkatkan potensi diri. Melalui pendidikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin kebutuhan pendidikan menjadi sangatlah penting.

Menurut UU No.20 Tahun 2003, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan sausana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.dari definisi ini adanya pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang diperlukan masyarakatuntuk meningkatkan potensi dalam dirinya, yang nantinya potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mencari pendapatan.

Semakin tinggi pendidikan menandakan semakin tinggi pula pengalaman serta penguasaan potensi diri, sehingga diharapakan dapat memberikan manfaat dalam mencari pekerjaan bagi masyarakat. Adanya pendidikan dapat berdampak pada tingginya pendapatan yang diperoleh masyarakat. Sehingga nantinya pendapatan tersebut dapat digunakan untuk memenuhu kebutuhan hariannya.

Indikator pendidikan yang dapat dijadikan ukuran kesejahteraan sosial suatu daerah yang merata adalah dengan melihat angka melek huruf di suatu wilayah. Menurut BPS Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana terhadap penduduk usia 15 tahun keatas.

Menurut BPS Angka Melek Huruf (AMH) dapat digunakan untuk melihat seberapa banyak penduduk di suatu wilayah yang memiliki kemampuan dasar untuk memperluas akses informasi, menambah pengetahuan dan ketrampilan, memudahkan komunikasi serta mempromosikan pemahaman yang lebih baik sehingga penduduktersebut mampu meningkatkan kualitas hidup diri, kluarga, maupun negaranya. Disamping itu dengan melihat Angka Melek Huruf (AMH) dapat juga membantu pemerintah untuk mengevaluasi program pemberantasan kemiskinan.

Angka Melek Huruf (AMH) berkisar antara 0- 100 (standar UNDP). Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif. Apabila tingkat melek huruf menunjukkan angka yang mendekati 0 (nol) maka sebaliknya, yaitu menunjukkan bahwa kualitas masyarakat disuatu wilayah mempunyai sistem pendidikan dasar yang sangat minim sehingga perlu kebijakan untuk menangani permasalahan berkenaan peningkatan pendidikan dasar.

2.2.5.1 Hubungan Pendidikan dengan Kemiskinan

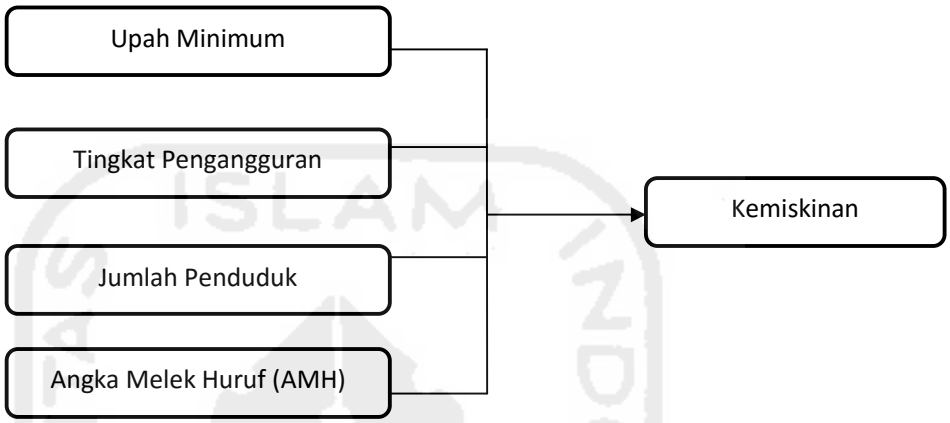
Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting sebagai salah satu penyebab kemiskinan. Kemiskinan terjadi akibat adanya pendidikan yang rendah, pendidikan yang rendah akan berdampak pada kualitas modal manusia yang rendah pula. Kualitas sumber daya manusia yang rendah dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat,ini dikarenakan dalam penawaran tenaga kerja ada beberapa kriteria tertentu sebagai syarat untuk bekerja salah satunya adalah adanya tingkat pendidikan yang tinggi. Menurut Arsyad (2004) adanya pendidikan bisa berperan penting dalam mengurangi kemiskianan dalam jangka panjang, baik secara tidak langsung melalui perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum, maupun secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan mereka.

Ustama (2009) Dengan pendidikan yang baik, setiap orang memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan, mempunyai pilihan untuk mendapat pekerjaan, dari menjadi lebih produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Dengan demikian pendidikan dapat memutus mata rantai kemiskinan dan menghilangkan eksklusi sosial, untuk kemudian meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2.3 KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran Teoritis



2.4 HIPOTESIS

Merupakan jawaban sementara dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti.oleh karena itu jawaban sementara yang menjadi hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Diduga variabel upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015
2. Diduga variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015

3. Diduga variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015
4. Diduga variabel angka melek huruf berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015
5. Diduga variabel upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk dan angka melek huruf secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggabungan data *cross section* dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan *Times Series* dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, penulis mengumpulkan data dari data-data yang dipublikasikan oleh BPS Provinsi Jawa Tengah dalam berbagai tahun publikasi seperti Tengah Dalam Angka, statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah Hasil SUSENAS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Jawa Tengah, Indikator Sosial Politik dan Keamanan Jawa Tengah.

3.2 Definisi OperasionalVariabel

Variabel yang penelitian yang digunakan ada 4 variabel bebas (independen) dan variable terikat (dependen) .Variable independen dalam penelitian ini adalah, tingkat tingkat upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk, dan AngkaMelek Huruf (AMH), sedangkan variabel terikat dalampenelitian ini adalah tingkat kemiskinan.untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman terhadap variable-variabel yang akan dianalisis

dalam penelitian ini, maka perlu dirumuskan definisi operasional variable, yaitu sebagai berikut :

1. Kemiskinan

   Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Data kemiskinan yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kemiskinan Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015 (Dalam Persen).

2. Upah minimum

   Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah upah minimum Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015 (dalam rupiah).

3. Pengangguran

   Pengangguran sendiri merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya (Sukirno, 2011). Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015 (dalam persen).

4. Jumlah Penduduk

   Jumlah penduduk merupakan jumlah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam

bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015 (dalam jiwa).

5. Angka Melek Huruf

   Angka Melek Huruf merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana terhadap penduduk usia 15 tahun keatas. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah angka melek huruf Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015 (dalam persen).

3.3 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel (*pooled data*) sebagai alat pengolahan data serta dalam analisisnya menggunakan program *Eviews 8*. Data panel merupakan data gabungan antara data (*time series)* dan (*cross section)* .Analisis ekonometrika dengan menggunakan data panel akan memberikan beberapa manfaat terkait dengan adanya kelemahan pada dua jenis data lainnya, yaitu mengatasi heterogenitas data, keterbatasan data, dan sekaligus mengatasi variasi data sebagai akibat perubahan waktu (*time variant*). Adapun persamaan model dalam bentuk *cross section* dapat dituliskan dalam model berikut :

$$Yi = \beta 0 + \beta 1\ Xi + \varepsilon i\ ;\ i = 1, 2, \ldots\ldots ,\quad n$$

Dimana β0 adalah intersep atau konstanta, β1 adalah koefisien regresi, dan εi adalah variabel gangguan (*error).* Sedangkan persamaan model regresi *Times series* adalah sebagai berikut :

$$Yt = \beta 0 + \beta 1\ Xt + \varepsilon t\ ;\ t = 1, 2 , \ldots.., t$$

Dimana t menunjukkan banyaknya periode waktu data *time series*. Mengingat data panel merupakan gabungan dari data *cross section* dan data *time series*, maka model regresi data panel dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Yit = \beta 0it + \beta 1\ X1it\ +\ \varepsilon it$$

$$n= 1,3,\ldots,n\ ;\ t = 1\ ,\ 2,\ldots.t$$

Dimana n adalah banyaknya variable bebas, i adalah jumlah unit observasi, t adalah banyaknya periode waktu, sehingga (n x t) menunjukkan banyaknya data panel yang akan di analisis. Maka bentuk regresi data panel untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$POV = \beta 0 + \beta 1\ UMK_{1it} + \beta 2\ TPT_{2it} + \beta 3\ JP_{3it} + \beta 4\ MH_{4it} + \varepsilon$$

Dimana :

POV = Persentase jumlah penduduk miskin Kabupaten i tahun t (persen)

$\beta 0$ = Konstanta

$\beta 1$ $\beta 2$ $\beta 3$ = Koefisien variable independen

UMP_{1it} = Upah Minimum Kabupaten Kabupaten i tahun t (rupiah)

TPT_{2it} = Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten i tahun t (persen)

JP_{3it} = Jumlah Penduduk Kabupaten i tahun t (jiwa)

MH_{4it} = Melek Huruf Kabupaten i tahun t (persen)

Karena terdapat perbedaan dalam satuan dan besaran variabel bebas dalam persamaan regresi harus dibuat dengan model logaritma natural. Alasan pemilihan model logaritma natural menurut Ghozali (2005) adalah sebagai berikut :

a. Menghindari adanya heteroskedastisitas
b. Mengetahui koefisien yang menunjukkan elastisitas dan,
c. Mendekatkan skala data.

Dalam model penelitian ini logaritma yang digunakan adalah dalam bentuk semilog linear (semi-log). Dimana semi-log mempunyai beberapa keuntungan diantaranya :

a. Koefisien – koefisien model semi-log mempunyai interpertasi yang sederhana
b. Model semi-log sering mengurangi masalah statistik umum yang dikenal sebagai heteroskedastisitas,

c. Model semi-log mudah dihitung .

Sehingga persamaan penelitian dengan model semi-log adalah sebagai berikut :

$$POV = \beta 0 + \beta 1\ LogUMK_{1it} + \beta 2\ TPT_{2it} + \beta 3\ LogJP_{3it} + \beta 4\ MH_{4it} + \varepsilon$$

Keunggulan regresi data panel menurut Wibisono (2005) antara lain:

1. Panel data mampu memperhitungkan heterogenitas individu eksplesit dengan mengizinkan variable spesifik individu
2. Kemampuan mengontrol heterogenitas ini selanjutnya menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku lebih kompleks
3. Data panel mendasarkan diri pada observasi *cross-section* yang berulang-ulang (*Times Series)*,sehingga metode data panel cocok digunakan sebagai *study of dynamic adjustment*
4. Tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informative, lebih variatif, dan kolinearitas (multiko) antara data semakin berkurang, dan derajat kebebasan (*degree of freedom)* lebih tinggisehingga dapat diperoleh hasilestimasi yang lebih efisien.
5. Data panrl dapat digunakan untuk mempelajari model-modelperilaku yang lebih kompleks
6. Dapat digunakan untuk meminimalkan bias yang mungkin di timbulkan oleh agregasi data individu

3.3.1 Metode Analisis Data Panel

Dalam mengestimasi data panel menggunakan tiga macam pendekatan,yaitu :

1. Pendekatan Pendekatan pooled Least Square (OLS) atau *common effect:*

   Estimasi model common effect merupakan salah satu model analisis regresi data panel yang paling sederhana. Dalam model analisis ini diansumsikan bahwa intersep dan slope selalu tetap baik antar waktu maupun antar individu. Sistematika model ini menggabungkan antara data *time series* dan data *cross section* ke dalam data panel (pooled data) yang dapat diregresi menggunakan metode OLS.

2. Pendekatan *Fixed Effect*

   Model estimasi ini merupakan suatu pendekatan yang mengansumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel model ini menggunakan variable dummy untuk menangkap perbedaan intersep antar individu. Namun demikian, slopenya sama antar individu.

3. *Random effect* Model

   Model ini mengestimasi data panel di mana variable gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu atau antar individu. Pada model ini intersep diakomodasi oleh *error terms* masing-masing individu, model ini juga disebut dengan *Error Component Model (ECM)* atau teknik *Generalied Least Square* (GLS).

3.3.2 Pemilihan Model Dalam Pengolahan Data

Menurut Sriyana (2014) untuk mengestimasi regresi data panel dengan menggunakan metode *common effect, fixed effect*, dan *random effect*, beberapa model yang digunakan adalah:

1. Uji F Statistik (Chow) , untuk memilih model yang lebih baik antara model *common effect* (tanpa variable dummy) atau dengan model *fixed effect.*
2. Uji Hausman untuk membandingkan antara model *fixed effect* atau *random effect* yang lebih baik untuk digunakan.
3. Uji Langrange Multipler (LM) atau lengkapnya The Breusch-Pagan LM test digunakan untuk memilih model *common effect* (tanpa variable dummy) atau dengan model *random effect.*

3.3.2.1 Uji Signifikansi Fixed Effect (Chow-Test)

Uji Signifikansi *Fixed Effect* merupakan tahap pertama pengujian pemilihan model. Pengujian ini digunakan untuk memilih model antara model *common effect* atau model *fixed effect.* Pengujian signifikansi *fixed effect* dapat dilakukan dengan melakukan uji statistic F. Cara ini dilakukan dengan melihat nilai *residual sumof squares* (RSS) dari kedua model regresi tersebut.

$$F_{\text{Hitung}} = \frac{(RSS1 - RSS2/\ i - t}{(RSS2)/\ (it - i - k)}$$

Dimana, RSS1 dan RSS2 masing-masing adalah *residual sumof squares* model *common effect* tanpa variable *dummy* dan model *Fixed Effect* dengan variable *dummy*, i = merupakan jumlah individu, t = jumlah periode waktu , k = banyaknya parameter dalam model *Fixed Effect.*

Nilai F hitung yang diperoleh selanjutnya diuji berdasarkan nilai F tabel dengan *df* sebesar *m* untuk numerator dan n-k untuk denumerator. Nilai statistic F akan menhikuti nilai distribusi statistic F dengan derajat kebebasan (df) sebesar n-1 untuk numerator dan sebesar (i.t)-k untuk denumerator.

Kesimpulannya adalah jika nilai statistic F yang dihasilkan lebih besar dibandingkan nilai F-tabel pada tingkat signifikansi yang digunakan maka regresi data panel dengan menggunakan model *Fixed Effect* lebih baik jika dibandingkan dengan model regresi data panel menggunakan *common effect.*

Untuk melihat model mana yang baikdigunakan antara *fixed effect* dan *common effect* dapat juga diketahui dengan membandingkan antara nilai probabilitas F-statistik dengan tingkat signifikansi α . Apabila $p < \alpha$, maka model *Fixed Effect* lebih baik digunakan dibandingkan menggunakan model *common effect.*

3.3.2.2 Uji Hausman

Untuk melihat apakah model mengikuti *random effect* atau *fixed effect* digunakan uji hausman. Unsur penting untukuji ini adalah covarian matriks dari perbedaan vector $(\beta-\beta_{GLS})$:

$$Var(\beta-\beta_{GLS}) = Var(\beta)+ Var(\beta_{GLS})-Cov(\beta,\beta_{GLS}) - Cov(\beta-\beta_{GLS}) \ldots\ldots\ldots(1)$$

Hasil metode hausman adalah bahwa perbedaan kovarian dari estimator yang efisien dengan estimator yang tidak efisien adalah nol sehingga;

$Cov((\beta-\beta_{GLS}),\beta_{GLS}= Cov\ (\beta-\beta_{GLS})- Var\ (\beta_{GLS})=0$…….(2)

$Cov\ (\beta-\beta_{GLS}) = Var\ (\beta_{GLS})$

Kemudian memasukkan persamaan (1) akan menghasilkan kovarian matriks sebagai berikut ;

$Var\ (\beta-\beta_{GLS}) = Var(\beta)- Var\ (\beta_{GLS})= Var(q)$….....(3)

Selanjutnya mengikuti distribusi chi-square ;

$M= q'Vaar\ (q)^{-1}\ q$

Dimana : $q = (\beta-\beta_{GLS})$

$Var(q) = Var\ (\beta) – Var\ (\beta_{GLS})$,

a. Statistic hausman > nilai kritisnya → model yang tepat *fixed effect*
b. Statistik hausman < nilai kritisnya → model yang tepat *random effect*

3.3.2.3 Uji Langrange Multipler (LM)

Menurut Widarjono (2009) uji LM merupakan uji yang secara umumdigunakan untuk mendeteksi masalah autokorelasi.Bisa juga digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dalam model autoregresif .Adapun nilai statistic LM dihitung berdasarkan formula :

$$LM = \frac{nT}{2\,(T-1)}\left[\frac{\sum_{i=1}^{n}[\sum_{i=1}^{t}\widehat{eit^2}]}{\sum_{i=1}^{n}\sum_{t=1}^{t}\widehat{eit^2}} - 1\right]^2 = \frac{nT}{2(T-1)}\left[\frac{\sum_{i=l}^{n}(\widehat{Tei)^2}}{\sum_{i=l}^{n}\sum_{t=l}^{t}eit^2} - 1\right]^2$$

Dimana : n = Jumlah individu

T = Jumlah periode waktu

e = Residual metode OLS

Jika :

1. Nilai statistic LM > nilai kritis statistic chi-square (memilih *random effect)*
2. Nilai statistic LM < nilai kritis statistic chi-square (memilih *common effect)*

3.3.3 Pengujian Statistik

3.3.3.1 Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Sriyana (2014), uji koefisien determinasi dilakukan untuk menjelaskan seberapa besar garis regresi menjelaskan perilaku datanya. Adapun rumus dari koefisien determinasi sebagai berikut :

R^2 = ESS / TSS

= 1 – RSS/TSS

$$= 1 - \frac{(\sum \hat{e}_i^2)}{\sum y_i^2}$$

$$= 1 - \frac{(\sum \hat{e}_i^2)}{\sum (Y_i - \bar{Y})^2}$$

Dari rumus tersebut tampak bahwa koefisien determinasi akan meningkat sesuai dengan jumlah variable bebasnya. Artinya koefisien determinasi akan semakin besar jika kita terus menambah variable independen dalam model. Para

ahli ekonometrik mengembangkan alternative lain agar R^2 tidak merupakan fungsi darivariable independen. Alternatifnya digunakan R^2 yang disesuaikan (R^2 *adjusted*= $\bar{R}^2$) dengan rumus sebagai berikut :

$$\bar{R}^2 = 1 - \frac{(\sum \hat{e}_i^2) \ /(n-k)}{\sum(Y_i - \bar{Y})^2/(n-1)}$$

Dimana :

k = jumlah koefisien regresi, termasuk intersep

n = jumlah observasi

koefisien determinasi memiliki nilai antara 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi nilainya maka menunjukkan semakin eratnya hubungan antara variable bebas dengan varabel terikat.

3.3.3.2Uji t (pengujian variable secara individu)

Uji ini digunakan untuk mengetahui signifikan atau tidak signifikannya variable independen terhadap variable dependen. Adapun hipotesis untuk uji t sebagai berikut :

1. Jika hipotesis signifikan positif
   a. Ho : ßi ≤ 0
   b. H1 : ßi > 0
2. Jika hipotesis signifikan negatif
   a. H0 : ßi ≥ 0
   b. H1 : ßi < 0

Menentukan tingkat signifikan alfa (α) yaitu sebesar 5 %

Kriteria pengujian :

1. Jika nilai probabilitas t- statistic > 0,05, maka Ho diterima , artinya variable bebas tidak mempengaruhi variable terikat secara signifikan
2. Jika nilai probabilitas t – Statistik < 0,05 , maka Ho ditolak, artinya variable bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap variable terikat.

3.3.3.3 Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui significant ataupun tidak significan variable independen terhadap variable dependen secara menyeluruh. Uji F ini menggunakan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Ho : ß1 = ß2 = ß3 = 0, berarti tidak ada pengaruh signifikan dari variable independen terhadap variable dependen.
   H1 : ß1 ≠ ß2 ≠ ß3 ≠ 0, berarti ada pengaruh signifikan dari variable independen secara bersama-sama terhadap variable dependen.
2. Menentukan besarnya nilai F hitung dan signifikansi F (sig-F)
3. Menentukan tingkat signifikan (α) alfa yaitu sebesar 5 %
4. Kriteria pengujian :
   a. Jika nilai sig. F > 0,05 , maka Ho diterima, artinya variable bebas secara serentak tidak mempengaruhi variable terikat secara signifikan
   b. Jika nilai sig. F < 0,05 , maka Ho ditolak, artinya variable bebas secara serentak mempengaruhi variable terikat secara signifikan.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

4.1 Diskripsi Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data runtut waktu atau *time series* dan data *cross section*.Variable yang digunakan yaitu variable independen yang terdiri dari Upah Minimum Kabupaten (UMK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Jumlah Penduduk (JP), dan Angka Melek Huruf (AMH) sedangkan variable dependennya sendiri adalah persentase jumlah kemiskinan Provinsi Jawa Tengah.

Alat bantu yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini berupa alat bantu *Eviews 8 (eviews)*. Penelitian ini menggunakan analisis secara ekonometrik.

4.1.1 Perkembangan Upah Minimum

Upah merupakan imbal balik yang diterima pekerja atas apa yang dilakukankepada pengusaha.Upah minimum merupakan upah yang ditetapkan secara minimum Regional, Sektoral Regional maupun Sub Sektoral (Sumarsono, 2003). Dalam penetapan upah minimum, didasarkan pada tingkat Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 upah minimum Kabupaten Provinsi Jawa Tengah selalu mengalami

kenaikan setiap tahunnya. Dengan adanya peningkatan upah minimum tersebut diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Pada periode 2011 hingga 2015 upah minimumKabupaten tertinggi terdapat di Kota semarang , upah minimum tersebut mencapai Rp. 1685.000, ini dikarenakan Kota Semarang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dimana wilayah tersebut memiliki biaya hidup yang tinggi. Sedangkan untuk tingkat upah minimum terendah pada tahun 2015 terdapat pada Kabupaten Banyumas yaitu sebesar Rp.1.100.000.

Tabel 4.1
Upah Minimum Kabupaten Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2011-2015

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
Kabupaten Cilacap	718666.67	773000.00	887667.00	1125000.00	1195666.97
Kabupaten Banyumas	750000.00	795000.00	877500.00	1000000.00	1100000.00
Kabupaten Purbalingga	765000.00	818500.00	896500.00	1023000.00	1101600.00
Kabupaten Banjarnegara	730000.00	765000.00	835000.00	920000.00	1112500.00
Kabupaten Kebumen	727500.00	770000.00	835000.00	975000.00	1157500.00
Kabupaten Purworejo	755000.00	809000.00	849000.00	910000.00	1165000.00
Kabupaten Wonosobo	775000.00	825000.00	880000.00	990000.00	1166000.00
Kabupaten Magelang	802500.00	870000.00	942000.00	1152000.00	1255000.00
Kabupaten Boyolali	800500.00	836000.00	895000.00	1116000.00	1197800.00
Kabupaten Klaten	766022.00	812000.00	871500.00	1026600.00	1170000.00
Kabupaten Sukoharjo	790500.00	843000.00	902000.00	1150000.00	1223000.00
Kabupaten Wonogiri	730000.00	775000.00	830000.00	954000.00	1101000.00
Kabupaten Karanganyar	801500.00	846000.00	896500.00	1060000.00	1226000.00
Kabupaten Sragen	760000.00	810000.00	864000.00	960000.00	1105000.00
Kabupaten Grobogan	735000.00	785000.00	842000.00	935000.00	1160000.00
Kabupaten Blora	816200.00	855500.00	932000.00	1009000.00	1180000.00
Kabupaten Rembang	757600.00	816000.00	896000.00	985000.00	1120000.00
Kabupaten Pati	769550.00	837500.00	927600.00	1013027.00	1176500.00
Kabupaten Kudus	840000.00	889000.00	990000.00	1150000.00	1380000.00
Kabupaten Jepara	758000.00	800000.00	875000.00	1000000.00	1150000.00
Kabupaten Demak	847987.00	893000.00	995000.00	1280000.00	1535000.00
Kabupaten Semarang	880000.00	941600.00	1051000.00	1208200.00	1419000.00
Kabupaten Temanggung	779000.00	866000.00	940000.00	1050000.00	1178000.00
Kabupaten Kendal	843750.00	893000.00	953100.00	1206000.00	1383450.00
Kabupaten Batang	805000.00	880000.00	970000.00	1146000.00	1270000.00
Kabupaten Pekalongan	810000.00	873000.00	962000.00	1145000.00	1271000.00
Kabupaten Pemalang	725000.00	793000.00	908000.00	1066000.00	1193400.00
Kabupaten Tegal	725000.00	795000.00	850000.00	1000000.00	1155000.00
Kabupaten Brebes	717000.00	775000.00	859000.00	1000000.00	1166550.00
Kota Magelang	795000.00	837000.00	901500.00	1037000.00	1211000.00
Kota Surakarta	826252.00	864450.00	915900.00	1145000.00	1222400.00
Kota Salatiga	843469.00	901396.00	974000.00	1170000.00	1287000.00
Kota Semarang	961323.00	991500.00	1209100.00	1423500.00	1685000.00
Kota Pekalongan	810000.00	895500.00	980000.00	1165000.00	1291000.00
Kota Tegal	735000.00	795000.00	860000.00	1044000.00	1206000.00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

4.1.2 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran merupakan merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya (Sukirno, 2011).

Menurut BPS Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dihitung dari perbandingan antara banyaknya jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka menggambarkan ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dan penduduk yang berusaha mendapatkan pekerjaan, dimana ketersediaan lapangan pekerjaan lebih kecil dari pencari kerja sehingga tidak mampu menampung pencari kerja. Perkembangan TPT di Jawa Tengah selama periode 2013-2015 terus menurun dari 6,01% turun 5,68% dan turun lagi menjadi 4,99%, artinya pada periode tersebut bertambah sekitar 1 orang dari 100 orang angkatan kerja yang baru memperoleh pekerjaan, namun meskipun pengangguran terus menurun, bukan berarti persoalan ketenagakerjaan sudah teratasi. Masih harus diteliti lebih lanjut, mereka yang sudah bekerja apakah sudah memiliki produktivitas yang tinggi atu tidak (BPS Jawa Tengah, 2015).

Tabel 4.2
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2011-2015

Kabupaten / Kota	2011	2012	2013	2014	2015
Kabupaten Cilacap	7.07	5.61	6.01	5.68	4.99
Kabupaten Banyumas	10.82	7.29	6.68	5.65	8.01
Kabupaten Purbalingga	6.61	5.11	5.45	5.37	6.37
Kabupaten Banjarnegara	5.1	5.02	5.63	5.13	4.84
Kabupaten Kebumen	4.97	3.69	4.16	4.06	5.05
Kabupaten Purworejo	4.73	3.58	3.52	3.25	4.14
Kabupaten Wonosobo	5.30	3.20	5.15	5.10	4.01
Kabupaten Magelang	4.92	5.21	5.82	5.34	4.47
Kabupaten Boyolali	6.83	4.38	6.13	7.45	5.16
Kabupaten Klaten	5.81	4.43	5.44	4.95	2.03
Kabupaten Sukoharjo	7.63	3.70	5.34	4.75	2.51
Kabupaten Wonogiri	6.27	6.1	5.98	4.60	4.52
Kabupaten Karanganyar	3.82	3.46	3.61	3.45	3.07
Kabupaten Sragen	5.78	5.82	3.84	3.54	3.60
Kabupaten Grobogan	8.43	5.88	5.63	6.04	4.51
Kabupaten Blora	5.33	4.20	6.10	4.25	5.22
Kabupaten Rembang	6.90	4.75	6.23	4.30	4.68
Kabupaten Pati	7.22	5.75	5.97	5.23	4.51
Kabupaten Kudus	11.17	11.98	7.29	6.37	4.43
Kabupaten Jepara	8.32	5.89	8.07	5.03	5.04
Kabupaten Demak	5.48	4.29	6.34	5.09	3.12
Kabupaten Semarang	5.03	8.4	7.08	5.17	6.02
Kabupaten Temanggung	6.16	4.87	3.9	4.38	2.57
Kabupaten Kendal	3.54	3.39	4.87	3.19	1.50
Kabupaten Batang	6.54	6.31	6.43	6.15	7.07
Kabupaten Pekalongan	6.66	5.88	7.02	7.42	4.56
Kabupaten Pemalang	6.91	5.08	4.78	6.03	5.10
Kabupaten Tegal	7.37	4.85	6.48	7.44	6.53
Kabupaten Brebes	10.59	6.12	6.89	8.47	9.52
Kota Magelang	11.08	8.22	9.61	9.53	6.49
Kota Surakarta	11.51	8.99	6.75	7.38	6.43
Kota Salatiga	7.70	6.29	7.22	6.16	4.53
Kota Semarang	9.02	6.84	6.21	4.46	6.43
Kota Pekalongan	7.65	6.01	6.02	7.76	5.77
Kota Tegal	8.06	7.67	5.28	5.42	4.10

Sumber : BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Jawa Tengah 2015

4.1.3 Perkembangan Jumlah Penduduk

Memperhatikan laju pertumbuhan penduduk pertahun periode 2011-2015 maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah patut berbangga karena data pertambahan penduduknya mengalami penurunan pertahun. Tahun 2011 penduduk Jawa Tengah bertambah 281.492 jiwa dibanding tahun sebelumnya, tahun 2012 pertambahannya menyusut hanya sebanyak 273.314 jiwa, terus menyusut sampai dengan tahun 2015 hanya bertambah 251.478 jiwa. Dilihat berdasarkan kabupaten/kota pada periode 2014-2015, sebanyak 16 kabupaten/kota laju pertumbuhan penduduknya berada di atas laju pertumbuhan penduduk provinsi. Sementara itu, 19 kabupaten/kota laju pertumbuhan penduduk di bawah angka provinsi. Mengamati pertumbuhan penduduk di tingkat kabupaten/kota, terlihat Kota Semarang memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi se Jawa Tengah sebesar 1,68 persen, diikuti Kabupaten Jepara 1,50 persen dan Kota Salatiga 1,38 persen. Kabupaten/kota dengan dengan laju pertumbuhan penduduk terendah yaitu Kota Magelang 0,29 persen, selanjutnya dengan laju pertumbuhan sekitar 0,34 persen yaitu Kabupaten Purworejo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Pemalang, berikutnya Kabupaten Wonogiri sebesar 0,35 persen (BPS, Jawa Tengah 2015).

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk (jiwa) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
Kabupaten Cilacap	1651940.00	1643555.00	1676089.00	1685573.00	1694000.00
Kabupaten Banyumas	1570598.00	1568398.00	1605579.00	1620918.00	1635000.00
Kabupaten Purbalingga	858798.00	858474.00	879880.00	889214.00	898000.00
Kabupaten Banjarnegara	875214.00	871955.00	889921.00	895986.00	901000.00
Kabupaten Kebumen	1162294.00	1157342.00	1176722.00	1181006.00	1185000.00
Kabupaten Purworejo	696141.00	693168.00	705483.00	708038.00	710000.00
Kabupaten Wonosobo	758993.00	754802.00	769318.00	773280.00	777000.00
Kabupaten Magelang	1194353.00	1193005.00	1221681.00	1233695.00	1245000.00
Kabupaten Boyolali	936822.00	932651.00	951817.00	957857.00	963000.00
Kabupaten Klaten	1135201.00	1128137.00	1148994.00	1154040.00	1158000.00
Kabupaten Sukoharjo	832094.00	840718.00	849506.00	856937.00	864000.00
Kabupaten Wonogiri	929870.00	925890.00	942377.00	945817.00	949000.00
Kabupaten Karanganyar	821694.00	820939.00	840171.00	848255.00	856000.00
Kabupaten Sragen	861939.00	856318.00	871989.00	875600.00	879000.00
Kabupaten Grobogan	1316693.00	1310217.00	1336304.00	1343960.00	1351000.00
Kabupaten Blora	833786.00	828783.00	844444.00	848369.00	852000.00
Kabupaten Rembang	596801.00	595376.00	608903.00	614087.00	619000.00
Kabupaten Pati	1198935.00	1193593.00	1218016.00	1225594.00	1232000.00
Kabupaten Kudus	788264.00	791018.00	810810.00	821136.00	830000.00
Kabupaten Jepara	1115688.00	1120339.00	1153213.00	1170797.00	1187000.00
Kabupaten Demak	1067993.00	1067776.00	1094472.00	1106328.00	1117000.00
Kabupaten Semarang	944877.00	947512.00	974092.00	987557.00	1000000.00
Kabupaten Temanggung	715907.00	714921.00	731911.00	738915.00	745000.00
Kabupaten Kendal	908533.00	906292.00	926812.00	934643.00	942000.00
Kabupaten Batang	713942.00	713226.00	729616.00	736397.00	743000.00
Kabupaten Pekalongan	845471.00	843211.00	861082.00	867573.00	873000.00
Kabupaten Pemalang	1264535.00	1257535.00	1279596.00	1284236.00	1288000.00
Kabupaten Tegal	1399789.00	1390571.00	1415009.00	1420132.00	1424000.00
Kabupaten Brebes	1742528.00	1732751.00	1764648.00	1773379.00	1781000.00
Kota Magelang	118606.00	117919.00	119935.00	120373.00	121000.00
Kota Surakarta	501650.00	498563.00	507825.00	510077.00	512000.00
Kota Salatiga	173056.00	173635.00	178594.00	181193.00	184000.00
Kota Semarang	1585417.00	1599702.00	1644800.00	1672999.00	1699000.00
Kota Pekalongan	284413.00	284068.00	290870.00	293704.00	296000.00
Kota Tegal	240777.00	239428.00	243860.00	244998.00	246000.00

Sumber : Sumber : BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Jawa Tengah 2015

4.1.4 Perkembangan Angka Melek Huruf

Tabel 4.4

Angka Melek Huruf Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
Kabupaten Cilacap	91.48	91.49	91.97	92.65	93.06
Kabupaten Banyumas	94.06	94.24	94.77	94.78	96.29
Kabupaten Purbalingga	93.50	93.52	93.78	95.77	95.32
Kabupaten Banjarnegara	88.48	88.49	89.02	93.44	95.10
Kabupaten Kebumen	91.53	91.54	91.78	91.85	94.33
Kabupaten Purworejo	91.74	92.79	93.53	94.98	94.21
Kabupaten Wonosobo	91.16	91.43	92.30	95.75	95.08
Kabupaten Magelang	93.29	93.31	93.64	92.89	95.26
Kabupaten Boyolali	87.96	87.97	88.12	88.46	91.50
Kabupaten Klaten	89.92	89.93	90.01	92.44	91.80
Kabupaten Sukoharjo	90.72	90.73	91.36	92.17	92.62
Kabupaten Wonogiri	83.50	84.32	84.60	85.94	87.12
Kabupaten Karanganyar	88.90	88.95	90.32	93.15	91.04
Kabupaten Sragen	84.41	84.41	84.49	87.25	82.42
Kabupaten Grobogan	90.41	90.94	91.78	94.90	92.90
Kabupaten Blora	85.06	85.06	85.46	89.42	86.97
Kabupaten Rembang	91.36	91.37	92.07	91.31	93.81
Kabupaten Pati	87.59	87.61	89.56	92.11	91.00
Kabupaten Kudus	93.73	93.74	94.16	95.49	94.32
Kabupaten Jepara	93.15	93.29	94.26	94.91	94.46
Kabupaten Demak	92.53	92.54	93.09	94.60	94.96
Kabupaten Semarang	93.67	94.20	94.59	94.83	95.13
Kabupaten Temanggung	95.96	95.97	95.99	92.35	95.99
Kabupaten Kendal	89.31	89.77	90.23	91.50	93.40
Kabupaten Batang	89.90	89.93	90.67	94.37	93.10
Kabupaten Pekalongan	92.08	92.11	93.42	96.17	93.71
Kabupaten Pemalang	90.79	90.80	91.09	89.58	92.10
Kabupaten Tegal	89.47	90.64	91.03	94.48	92.23
Kabupaten Brebes	86.15	86.69	87.68	88.51	89.01
Kota Magelang	97.29	97.52	98.11	96.78	98.01
Kota Surakarta	96.71	96.73	96.87	97.62	97.39
Kota Salatiga	96.52	96.55	96.73	95.41	98.30
Kota Semarang	96.47	96.98	97.72	97.54	97.85
Kota Pekalongan	95.93	95.94	96.24	98.26	97.69
Kota Tegal	94.90	94.91	94.92	93.61	94.75

Sumber: BPS, Susenas

Berdasarkan data BPS tahun 2011- 2015 angka melek huruf menunjukkan kenaikan, ini menunjukkan bahwa angka buta aksara di Provinsi Jawa Tengah semakin menunjukkan penurunan. Semakin naik angka melek huruf menandakan semakin baik pula kuaslitas sumber daya manusia. Apabila kualitas dumber daya manusia semakin meningkat maka akan memperbesar kesempatankerja yang nantinya akan berdampak pada pengurangan angka pengangguran yang berakibat pada penurunan angka kemiskinan. Angka melek huruf tertinggi ditahun 2015 terdapat di Kota Salatiga yaitu sebesar 98,30% dan Kabupaten dengan angka melek huruf terendah terdapat di Kabupaten Sragen dengan besar angka melek huruf 82,42 %.

4.2 Hasil dan Analisis

4.2.1 Hasil Pengujian Model Data Panel

1. Uji F- Statistik

Uji ini digunakan untuk memilih model yang akan digunakan antara model estimasi *common effect* atau model estimasi *fixed effect*,dengan uji hipotesis :

a. Ho : Memilih menggunakan model estimasi *common effect*, jika nilai probabilitas F-statistiknya tidak signifikan pada α = 5%
b. H1 : memilih menggunakan model estimasi *fixed effect*, jika nilai probabilitas F-Statistiknya signifikan pada α = 5%

Uji ini menggunakan distribusi probabilitas F statistik, apabila nilai probabilitas F statistic lebih besar daripada nilai alfa (α) maka model yang

digunakan adalah model estimasi *Common Effect*, sebaliknya apabila nilai probabilitas F statistik lebih kecil daripada nilaialfa (α)maka model yang digunakan adalah modelestimasi *Fixed Effect.*

Nilai probabilitas F statistik dari perhitungan menggunakan *eviews 8* adalah sebesar 0.0000 (kurang dari 5%), sehingga secara statistic Ho ditolak dan menerima H1, maka model yang tepat digunakan adalah model estimasi *Fixed Effect.*

Tabel 4.5

Hasil Uji Signifikansi *Fixed Effect*

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: PANEL
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	205.055080	(34,136)	0.0000
Cross-section Chi-square	692.353094	34	0.0000

Sumber : Data olahan eviews 8

2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih model yang akan digunakan antara model estimasi *fixed effect* atau model estimasi *random effect* dengan uji hipotesis :

a. Ho : memilih menggunakan *random effect*,jika nilai probabilitas *Chi Square statistic* tidak signifikan pada α = 5%
b. H1 : memilih menggunakan model estimasi *fixed effect*, jika nilai probabilitas *Chi Square statistic* signifikan pada α= 5%

Uji Hausman ini menggunakan distribusi probabilitas statistic *Chi Square*, bila nilai probabilitas statistic *Chi Square* lebih besar dari pada nilai alfa (α), maka model yang digunakan adalah model estimasi*random effect*,sebaliknya bila nilai probabilitas statistic *Chi Square* lebih kecil dari pada alfa (α), maka nilai yang digunakan adalah modelestimasi *fixed effect*

Nilai distribusi statistic *chi-square* dari perhitungan menggunakan eviews 8 adalah sebesar 15.435453 dengan probabilitas 0.0039 (lebih kecil dari α =5%), sehingga secara statistic Ho ditolak dan menerima H1, maka model yang tepat digunakan adalah model estimasi *Fixed Effect* (Tabel 4.6)

Tabel 4.6

Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: PANEL
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	15.435453	4	0.0039

Sumber : Data olahan eviews 8

4.2.2 Hasil Pengujian Statistik

Berdasarkan uji spesifikasi model yang telah dilakukan dengan menggunakan analisis uji chow dan hausman. Keduanya menunjukkan hasil menggunakan *fixed effect* model, maka model yang digunakan untuk mengestimasi factor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah adalah dengan menggunakan *fixed effect* model.

Berdasarkan model yang digunakan dalam penelitian ini (*fixed effect*) maka diperoleh hasil analisis estimasi data panel sebagai berikut :

Tabel 4.7

Hasil Estimasi *Fixed Effect*

Dependent Variable: POV
Method: Panel Least Squares
Date: 01/11/17 Time: 08:12
Sample: 2011 2015
Periods included: 5
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 175

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	139.3187	80.72237	1.725899	0.0866
LOG(UMK)	-3.913310	0.650817	-6.012922	0.0000
TPT	0.105795	0.042084	2.513903	0.0131
LOG(JP)	-4.598468	6.471115	-0.710615	0.4785
AMH	-0.102019	0.045117	-2.261179	0.0253

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.987330	Mean dependent var	13.98575
Adjusted R-squared	0.983789	S.D. dependent var	4.554672
S.E. of regression	0.579905	Akaike info criterion	1.941677
Sum squared resid	45.73536	Schwarz criterion	2.646972
Log likelihood	-130.8968	Hannan-Quinn criter.	2.227765
F-statistic	278.8873	Durbin-Watson stat	1.475894
Prob(F-statistic)	0.000000		

Dari estimasi fixed effect pada Tabel 4.7 dapat diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut :

POV = 139.3187 – 3.913310 LogUMK + 0.105795 TPT – 4.598468 LogJP - 0.102019 AMH + e

Dimana:

POV = Persentase Jumlah Penduduk Miskin

UMK = Upah Minimum Kabupaten/Kota Jawa Tengah

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah

JP = Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah

AMH = Angka Melek Huruf Provinsi Jawa Tengah

4.2.2.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah sesuatu yang menunjukkan seberapa besar variasi variable dependen POV dapat dijelaskan oleh variable-variabel independen UMK, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), jumlah penduduk, dan jumlah Angka Melek Huruf (AMH). Dari hasil regresi menggunakan *Fixed Effect*, nilai R^2 sebesar 0.987330, artinya bahwa variable dependen POV dapat dijelaskan oleh variable-variabel independen UMK, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), jumlah penduduk, dan jumlah Angka Melek Huruf (AMH) sebesar 98,7 % dan sisanya sebesar 1,3 % dapat dijelaskan oleh variable lain di luar model.

4.2.2.2 Pengujian Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji signifikansi parameter individual (uji t) digunakan untuk mengetahui signifikan atau tidak signifikannya variable independen terhadap variable dependen. Adapun hasil uji-t dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Pengujian terhadap Upah Minimum

   a. H0 : ßi ≥ 0, berarti tidak ada pengaruh signifikan dari variabel upah minimum terhadap variabel tingkat kemiskinan.

   b. H1 : ßi < 0, berarti ada pengaruh signifikan dari variabel upah minimum terhadap variabel tingkat kemiskinan.

   Berdasarkan model estimasi *fixed effect* pada Tabel 4.7, dengan tingkat taraf signifikan 5 % (α= 5 %) diperoleh hasil probabilitas variabel upah minimum sebesar 0.0000 (Prob. < α), yang berarti Ho ditolak dan menerima H1, menunjukkan bahwa variable Upah Minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan (POV) di Provinsi Jawa Tengah.

2. Pengujian terhadap tingkat pengangguran

   a. Ho : ßi ≤ 0, berarti tidak ada pengaruh signifikan dari variabel tingkat pengangguran terhadap variabel tingkat kemiskinan.

   b. H1 : ßi > 0, berarti ada pengaruh signifikan dari variabel tingkat pengangguran terhadap variabel tingkat kemiskinan.

   Berdasarkan model estimasi *fixed effect* pada Tabel 4.7, dengan tingkat taraf signifikan 5 % (α= 5 %) diperoleh hasil probabilitas variabel tingkat pengangguran sebesar 0.0131 (Prob. < α) yang berarti Ho ditolak dan menerima H1, menunjukkan bahwa variable tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan (POV) di Provinsi Jawa Tengah.

3. Pengujian terhadap jumlah penduduk (JP)

a.H0 : ßi ≥ 0, berarti tidak ada pengaruh signifikan dari variabel jumlah penduduk terhadap variabel tingkat kemiskinan.

b. H1 : ßi < 0, berarti ada pengaruh signifikan dari variabel jumlah penduduk terhadap variabel tingkat kemiskinan.

Berdasarkan model estimasi *fixed effect* pada Tabel 4.7, dengan tingkat taraf signifikan 5 % (α= 5 %) diperoleh hasil probabilitas variabel jumlah penduduk sebesar 0.4785 (prob. > α), yang berarti Ho diterima dan menolak H1, menunjukkan bahwa variable jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan (POV) di Provinsi Jawa Tengah.

4. Pengujian terhadap Angka Melek Huruf

a.H0 : ßi ≥ 0, berarti tidak ada pengaruh signifikan dari variabel angka melek huruf terhadap variabel tingkat kemiskinan.

b. H1 : ßi < 0, berarti ada pengaruh signifikan dari variabel angka melek huruf terhadap variabel tingkat kemiskinan.

Berdasarkan model estimasi *fixed effect* pada Tabel 4.7, dengan tingkat taraf signifikan 5 % (α= 5 %) diperoleh hasil probabilitas variabel angka melek huruf sebesar 0.0253 (Prob. < α) yang berarti Ho ditolak dan menerima H1, menunjukkan bahwa variable angka melek huruf mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan (POV) di Provinsi Jawa Tengah.

4.2.2.3 Pengujian Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variable-variabel independen bersama-sama mempengaruhi variable dependen atau tidak.

F-hitung dalam perhitungan menggunakan Eviews sebesar 278,8873 dengan probabilitas sebesar 0.0000 (kurang dari α= 5%), sehingga dapat disimpulkan bahwa secara estimasi *Fixed Effect*, variable-variabel independen seperti UMK, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), jumlah penduduk, dan Angka Melek Huruf (AMH) bersama-sama signifikan mempengaruhi variable dependen POV (tingkat kemiskinan)

4.2.3 Interpretasi Hasil dan Pembahasan

4.2.3.1 Analisis Pengaruh Upah Minimum terhadap Persentase Penduduk Miskin

Dilihat dari model estimasi *Fixed Effect* pada Tabel 4.7, diketahui bahwa variable upah minimum (UMK) mempunyai pengaruh signifikan dan memiliki korelasi yang negative terhadap tingkat kemiskinan antar Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Koefisien UMK diperoleh sebesar -3.913310, artinya apabila upah minimum meningkat sebesar 1%, maka jumlah penduduk miskin akan berkurang sebesar 3.913310%. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis bahwa UMK mempunyai pengaruhnegatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Sama dengan penelitian Riva .dkk (2014), dalam penelitiannya variabel upah minimum mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan hal ini dikarenakan bahwa penetapan upah minimum mempengaruhi

pendapatan yang diterima oleh pekerja sehingga akan menurunkan angka kemiskinan. Ketika upah minimum mengalami kenaikan maka akan memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan yang diterima masyarakat sehingga akan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan dasar, yang nantinya akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan akan mendorong terjadinya penurunan tingkat kemiskinan

Yanthi dan Marhaeni (2015) menyebutkan bahwa kesejahteraan buruh /pekerja disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan buruh/pekerja sehingga tingkat kesejahteraan buruh/pekerja tersebut meningkat, Kenaikan upah akan menguntungkan pihak buruh/pekerja dan pengusaha karena adanya produktivitas kerja yang meningkat dan pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

4.2.3.2 Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Persentase Penduduk Miskin

Dilihat dari model estimasi *Fixed Effect* Pada Tabel 4.7, diketahui bahwa variable Tingkat Pengangguran (TPT) mempunyai pengaruh signifikan dan memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat kemiskinan antar Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Koefisien tingkat pengangguran diperoleh sebesar 0.105795, artinya apabila tingkat pengangguran naik sebesar 1%, maka jumlah penduduk miskin akan bertambah sebesar 0.105795%. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis bahwa tingkat pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah .

Sama dengan penelitian Wardani (2013) dalam penelitiannya tingkat pengangguran mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Adanya pengangguran yang semakin tinggi akan menyebabkan penurunan pendapatan yang diterima masyarakat yang nantinya berpengaruh terhadap daya beli masyarakat sehingga secara otomatis akan menurunkan tingkat konsumsi, penurunan tingkat konsumsi ini dapat berdampak pada penurunan produktivitas masyarakat yang nantinya akan menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan.

Sukirno (2004) mengemukakan bahwa salah satu faktor penting yang mentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat diwujudkan. Adanya pengangguran akan mengurangi pendapatan masyarakat, dan ini akan mengurangi tingkat kemakmuran. Atau dengan kata lain akan meningkatkan kemiskinan.

4.2.3.3 Analisis Pengaruh Angka Melek Huruf terhadap Persentase Penduduk Miskin

Dilihat dari model estimasi *Fixed Effect* Pada Tabel 4.7, diketahui bahwa variabel Angka Melek Huruf (AMH) mempunyai pengaruh signifikan dan memiliki korelasi yang negative terhadap kemiskinan antar Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Koefisien AMH diperoleh sebesar -0.102019, artinya apabila Aangka Melek Huruf meningkat sebesar 1%, maka jumlah penduduk miskin akan berkurang sebesar 0.102019 %. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis

bahwa Angka Melek Huruf memiliki pengaruh negative dan sinifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah .

Sama dengan penelitian Dores (2014), bahwa angka melek huruf mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan mempunyai peran penting dalam penurunan tingkat kemiskinan. Adanya peningkatan mutu pendidikan akan meningkatkan keterampilan dan produktivitas yang nantinya berdampak pada peningkatan kesempatan kerja. Adanya peningkatan kesempatan kerja yang didukung dengan peningkatan lapangan kerja dapat menyebabkan kenaikan pendapatan yang nantinya dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Ustama (2009), mengatakan bahwa dengan pendidikan yang baik, setiap orang memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan, mempunyai pilihan untuk mendapat pekerjaan, dari menjadi lebih produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Dengan demikian pendidikan dapat memutus mata rantai kemiskinan dan menghilangkan eksklusi sosial, untuk kemudian meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan kata lain akan mengurangi kemiskinan.

4.2.3.4 Analisisis Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Persentase Penduduk Miskin

Berdasarkan model estimasi *Fixed Effect* pada Tabel 4.7, diketahui bahwa variable jumlah penduduk mempunyai pengaruh yang tidak signifikan dan memiliki korelasi yang negatif terhadap kemiskinan antar Kabupaten/Kota di

Provinsi Jawa Tengah. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis, ini dikarenakan pada tahun 2010 hingga tahun 2015 jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh penduduk usia produktif.

Berdasarkan data profil penduduk Jawa Tengah Hasil SUPAS tahun 2015 tercatat bahwa Jawa Tengah memiliki penduduk usia muda (0-14 tahun) sebesar 25, 12 %, penduduk usia Produktif (15-60 tahun) sebesar 63, 15% dan penduduk usia 60 tahun keatas di provinsi Jawa Tengah Sebesar 11,72 %, hal ini menunjukkan bahwa persentase jumlah penduduk usia produktif pada lima tahun terakhir memiliki persentase lebih besar dari pada penduduk usia muda dan lansia, sehingga adanya komposisi penduduk produktif yang lebih tinggi dapat memberikan kontribusi pada peluang masyarakat dalam mencari pekerjaan masih terbuka lebar hal tersebut dibuktikan dengan adanya penurunan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah.

Disamping itu adanya peningkatan penduduk yang disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jawa Tengah juga akan menurunkan tingkat kemiskinan, adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia sering dikaitkan dengan tercapainya fungsi pendidikan, sehingga dengan adanya maksimalisasi fungsi pendidikan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan sumber daya manusia yang produktif, terdidik dan terampil. Dengan adanya peningkatan fungsi pendidikan akan membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya yang nantinya berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini

dibuktikan dengan adanya peningkatan angka melek huruf di Provinsi Jawa Tengah pada lima tahun terakhir (tahun 2011-2015).

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaruh variable UMK, tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk,dan angka melek huruf terhadap presentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2011-2015, berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel Upah Minimum mempunyai pengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, artinya semakin tinggi Upah Minimum di Provinsi Jawa Tengah , maka persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah akan mengalami penurunan.
2. Variabel tingkat pengangguran mempunyai pengaruh positif dan signifikan dimana artinya semakin tinggi tingkat pengangggguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah , maka tingkat kemiskinandi Provinsi Jawa Tengah akan mengalami kenaikan.
3. Variabel Angka Melek Huruf (AMH) mempunyai pengaruh negative dan signifikan dimana artinya semakin tinggi Angka Melek Huruf (AMH) di Provinsi Jawa Tengah , maka tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah akan mengalami penurunan.

4. Variabel jumlah penduduk mempunyai pengaruh negative dan tidak signifikan dimana artinya variable jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh terhadap kenaikan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah .
5. Variabel Upah Minimum, Tingkat Pengangguran , Jumlah Penduduk, dan Angka Melek Huruf bersama-sama mempengaruhi kenaikan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

5.2 Implikasi

1. Upah minimum negative terhadap tingkat kemiskinan. Di Provinsi Jawa Tengah tingkat kemiskinan lebih dipengaruhi oleh variable Upah Minimum, oleh sebab itu kebijakan pemerintah berkaitan dengan penetapan upah minimum tetap perlu dilakukan, dan tingkat upahnya dinaikkan sesuai dengan kenaikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk melindungi pekerja dari kemiskinan.
2. Pengangguran mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, untuk itu diperlukan usaha untuk mengatasi pengangguran yaitu dengan pendirian lapangan kerja baru serta berbagai pelatihan berkenaan UMKM untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
3. Pendidikan mempunyai pengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Ini menandakan bahwa pendidikan sangat penting dalam menekan angka kemiskinan oleh sebab itu diperlukan

adanya pemerataan dan perbaikan fasilitas serta infrastruktur terutama di daerah pinggiran untuk menunjang perbaikan kualitas pendidikan.

4. Walaupun jumlah penduduk tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Jawa tengah, namun pemerintah tetap harus menurunkan angka pertumbuhan penduduk dengan memaksimalkan kebijakan Keluarga Berencana (KB) agar kedepannya permasalahan berkaitan dengan kenaikan jumlah penduduk tidak berdampak pada kenaikan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

Alvionita .dkk (2014), ”Pengaruh Tingkat Pengangguran dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau”, JOM FEKON,Vol.1 N0. 2,Oktober 2014.

Arsyad, Lincolin (2004), *Ekonomi Pembangunan***,** Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik (2012), ” Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonrsia Agustus 2012 ”, Badan Pusat Statistik, Indonesia.

_____ (2015), “Data dan Informasi Kemiskinan Jawa Tengah Berbagai Terbitan”, Badan Pusat Statistik , Jawa Tengah.

_____ (2015). ”Indikator Sosial Politik dan Keamanan Jawa Tengah 2015”, Badan Pusat Statistik, Jawa Tengah.

_____ (2015), ”Indikator Kesejahteraan Rakyat awa Tengah 2015”, Badan Pusat Statistik, Jawa Tengah.

_____ (2015), ”Profil Penduduk Jawa Tengah Hasil Supas 2015”,Badan Pusat Statistik, Jawa Tengah.

_____ (2015), ”Statistik Indonesia Berbagai Terbitan”,Badan Pusat Statistik, Indonesia.

Dores, Edi (2014), ”Pengaruh Angka Melek Huruf dan Angka Harapan Hidup Terhadap umlah PendudukMiskin di Provinsi Sumatra Barat”, Journal of Economic and Economic Education Vol.2 No.2 (126 - 133).

Ferryanto, Nur (2014), *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam PerspektifIndonesia***,** UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Ghozali, Imam (2005), Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, BP UNDIP, Semarang .

Gujarati, Damodar (2003), Basic Econonetrics, Fourth Edition, McGraw-Hill Companies, New York.

Hakim, Abdul (2002*), Ekonomi Pembangunan*, Ekonisia, Yogyakarta.

Jonaidi,Arius (2012), “Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan kemiskinan di Indonesia”, Jurnal Kajian Ekonomi, Volume 1, No. 1, April 2012.

Kuncoro, Mudrajad (1997), *Ekonomi Pembangunan (Teori Masalah danKebijakan),*UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Mustika, Candra (2011), ”Pengaruh PDB dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 1990 – 2008 ” , Jurnal Paradigma Ekonomika, Vol 1, No.4, Oktober 2011.

Nanga, Muana , 2005 , *Makro Ekonomi: Teori, Masalah, dan Kebijakan,* Rajawali Pers,Jakarta.

Pratomo, Devanto Shasta &PutuMahardika A.S (2011),”KebijakanUpah Minimum UntukPerekonomian yang Berkeadilan:Tinjauan UUD 1945”,Journal of Indonesian Applied Economics, Volume5 No. 2 Oktober 2011, 269-285.

Sriyana, Jaka (2014),*Metode Regresi Data Panel (Dilengkapi AnalisisKinerja Bank Syariah di Indonesia),* EKONISIA, Yogyakarta.

Sumarsono, Sonny (2003),*Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia danKetenagakeraan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

_____(2009). *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi SumberDaya Manusia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Sukirno, Sadono (2011),*Makro Ekonomi Pengantar Teori Edisi Ketiga,* Rajawali Pers, Jakarta .

_____(2010), ” Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Kebijakan”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Todaro, Michael P. dan Stephen C Smith (2006). *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan*, Erlangga, Jakarta.

Ustama, D. Dicky (2009), ” Peranan Pendidikan Dalam Pengentasan Kemiskinan”, Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Volume 6 No. 1, Januari 2009, 1-12.

Wardani, Listyanungrum K. (2013) . ”Pengaruh Pengangguran, Pengeluaran Pemerintah, dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2010*”,* Skripsi., Universitas Negeri Semarang, Semarang.

Widarjono, Agus (2009), *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Edisi ketiga,* Ekonisia, Jakarta.

Winarno, W. Wahyu , 2015,. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews,* UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Yanthi, Cokorda IDP. & Marhaeni (2015), "Pengaruh, Pendidikan, Tingkat Upah dan Pengangguran Terhadap Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Bali", Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Volume XI No.2 , Desember 2015.

Peraturan Pemerintah dan Perundang- Undangan

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Upah Minimum

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2015 tentang penetapan upah minimum

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang penetapan upah minimum.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang peran penting pendidikan

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Data Siap Olah Menggunakan Eviews

Kabupaten/Kota	Tahun	POV	UMK	TPT	JP	AMH
Cilacap	2011	17.15	718666.67	10.82	1651940.00	91.48
Cilacap	2012	15.92	773000.00	7.29	1643555.00	91.49
Cilacap	2013	15.24	887667.00	6.68	1676089.00	91.97
Cilacap	2014	14.21	1125000.00	5.65	1685573.00	92.65
Cilacap	2015	14.39	1195666.97	8.01	1694000.00	93.06
Banyumas	2011	21.11	750000.00	6.61	1570598.00	94.06
Banyumas	2012	19.44	795000.00	5.11	1568398.00	94.24
Banyumas	2013	18.44	877500.00	5.45	1605579.00	94.77
Banyumas	2014	17.45	1000000.00	5.37	1620918.00	94.78
Banyumas	2015	17.52	1100000.00	6.37	1635000.00	96.29
Purbalingga	2011	23.06	765000.00	5.10	858798.00	93.50
Purbalingga	2012	21.19	818500.00	5.02	858474.00	93.52
Purbalingga	2013	20.53	896500.00	5.63	879880.00	93.78
Purbalingga	2014	19.75	1023000.00	5.13	889214.00	95.77
Purbalingga	2015	19.70	1101600.00	4.84	898000.00	95.32
Banjarnegara	2011	20.38	730000.00	4.97	875214.00	88.48
Banjarnegara	2012	18.87	765000.00	3.69	871955.00	88.49
Banjarnegara	2013	18.71	835000.00	4.16	889921.00	89.02
Banjarnegara	2014	17.77	920000.00	4.06	895986.00	93.44
Banjarnegara	2015	18.37	1112500.00	5.05	901000.00	95.10
Kebumen	2011	24.06	727500.00	4.73	1162294.00	91.53
Kebumen	2012	22.40	770000.00	3.58	1157342.00	91.54
Kebumen	2013	21.32	835000.00	3.52	1176722.00	91.78
Kebumen	2014	20.50	975000.00	3.25	1181006.00	91.85
Kebumen	2015	20.44	1157500.00	4.14	1185000.00	94.33
Purworejo	2011	17.51	755000.00	5.30	696141.00	91.74
Purworejo	2012	16.32	809000.00	3.20	693168.00	92.79
Purworejo	2013	15.44	849000.00	5.15	705483.00	93.53
Purworejo	2014	14.41	910000.00	5.10	708038.00	94.98
Purworejo	2015	14.27	1165000.00	4.01	710000.00	94.21
Wonosobo	2011	24.21	775000.00	4.92	758993.00	91.16
Wonosobo	2012	22.50	825000.00	5.21	754802.00	91.43
Wonosobo	2013	22.08	880000.00	5.82	769318.00	92.30

Kabupaten/Kota	Tahun	POV	UMK	TPT	JP	AMH
Wonosobo	2014	21.42	990000.00	5.34	773280.00	95.75
Wonosobo	2015	21.45	1166000.00	4.47	777000.00	95.08
Magelang	2011	15.18	802500.00	6.83	1194353.00	93.29
Magelang	2012	13.97	870000.00	4.38	1193005.00	93.31
Magelang	2013	13.96	942000.00	6.13	1221681.00	93.64
Magelang	2014	12.98	1152000.00	7.45	1233695.00	92.89
Magelang	2015	13.07	1255000.00	5.16	1245000.00	95.26
Boyolali	2011	14.97	800500.00	5.81	936822.00	87.96
Boyolali	2012	13.88	836000.00	4.43	932651.00	87.97
Boyolali	2013	13.27	895000.00	5.44	951817.00	88.12
Boyolali	2014	12.36	1116000.00	4.95	957857.00	88.46
Boyolali	2015	12.45	1197800.00	2.03	963000.00	91.50
Klaten	2011	17.95	766022.00	7.63	1135201.00	89.92
Klaten	2012	16.71	812000.00	3.70	1128137.00	89.93
Klaten	2013	15.60	871500.00	5.34	1148994.00	90.01
Klaten	2014	14.56	1026600.00	4.75	1154040.00	92.44
Klaten	2015	14.89	1170000.00	2.51	1158000.00	91.80
Sukoharjo	2011	11.13	790500.00	6.27	832094.00	90.72
Sukoharjo	2012	10.16	843000.00	6.10	840718.00	90.73
Sukoharjo	2013	9.87	902000.00	5.98	849506.00	91.36
Sukoharjo	2014	9.18	1150000.00	4.60	856937.00	92.17
Sukoharjo	2015	9.26	1223000.00	4.52	864000.00	92.62
Wonogiri	2011	15.74	730000.00	3.82	929870.00	83.50
Wonogiri	2012	14.67	775000.00	3.46	925890.00	84.32
Wonogiri	2013	14.02	830000.00	3.61	942377.00	84.60
Wonogiri	2014	13.09	954000.00	3.45	945817.00	85.94
Wonogiri	2015	12.98	1101000.00	3.07	949000.00	87.12
Karanganyar	2011	15.29	801500.00	5.78	821694.00	88.90
Karanganyar	2012	14.07	846000.00	5.82	820939.00	88.95
Karanganyar	2013	13.58	896500.00	3.84	840171.00	90.32
Karanganyar	2014	12.62	1060000.00	3.54	848255.00	93.15
Karanganyar	2015	12.46	1226000.00	3.60	856000.00	91.04
Sragen	2011	17.95	760000.00	8.43	861939.00	84.41
Sragen	2012	16.72	810000.00	5.88	856318.00	84.41
Sragen	2013	15.93	864000.00	5.63	871989.00	84.49
Sragen	2014	14.87	960000.00	6.04	875600.00	87.25
Sragen	2015	14.86	1105000.00	4.51	879000.00	82.42
Grobogan	2011	17.38	735000.00	5.33	1316693.00	90.41

Kabupaten/Kota	Tahun	POV	UMK	TPT	JP	AMH
Grobogan	2012	16.14	785000.00	4.20	1310217.00	90.94
Grobogan	2013	14.87	842000.00	6.10	1336304.00	91.78
Grobogan	2014	13.86	935000.00	4.25	1343960.00	94.90
Grobogan	2015	13.68	1160000.00	5.22	1351000.00	92.90
Blora	2011	16.24	816200.00	6.90	833786.00	85.06
Blora	2012	15.11	855500.00	4.75	828783.00	85.06
Blora	2013	14.64	932000.00	6.23	844444.00	85.46
Blora	2014	13.66	1009000.00	4.30	848369.00	89.42
Blora	2015	13.52	1180000.00	4.68	852000.00	86.97
Rembang	2011	23.71	757600.00	7.22	596801.00	91.36
Rembang	2012	21.88	816000.00	5.75	595376.00	91.37
Rembang	2013	20.97	896000.00	5.97	608903.00	92.07
Rembang	2014	19.50	985000.00	5.23	614087.00	91.31
Rembang	2015	19.28	1120000.00	4.51	619000.00	93.81
Pati	2011	14.69	769550.00	11.17	1198935.00	87.59
Pati	2012	13.61	837500.00	11.98	1193593.00	87.61
Pati	2013	12.94	927600.00	7.29	1218016.00	89.56
Pati	2014	12.06	1013027.00	6.37	1225594.00	92.11
Pati	2015	11.95	1176500.00	4.43	1232000.00	91.00
Kudus	2011	9.45	840000.00	8.32	788264.00	93.73
Kudus	2012	8.63	889000.00	5.89	791018.00	93.74
Kudus	2013	8.62	990000.00	8.07	810810.00	94.16
Kudus	2014	7.99	1150000.00	5.03	821136.00	95.49
Kudus	2015	7.73	1380000.00	5.04	830000.00	94.32
Jepara	2011	10.32	758000.00	5.48	1115688.00	93.15
Jepara	2012	9.38	800000.00	4.29	1120339.00	93.29
Jepara	2013	9.23	875000.00	6.34	1153213.00	94.26
Jepara	2014	8.55	1000000.00	5.09	1170797.00	94.91
Jepara	2015	8.50	1150000.00	3.12	1187000.00	94.46
Demak	2011	18.21	847987.00	5.03	1067993.00	92.53
Demak	2012	16.73	893000.00	8.40	1067776.00	92.54
Demak	2013	15.72	995000.00	7.08	1094472.00	93.09
Demak	2014	14.60	1280000.00	5.17	1106328.00	94.60
Demak	2015	14.44	1535000.00	6.02	1117000.00	94.96
Semarang	2011	10.30	880000.00	6.16	944877.00	93.67
Semarang	2012	9.40	941600.00	4.87	947512.00	94.20
Semarang	2013	8.51	1051000.00	3.90	974092.00	94.59
Semarang	2014	8.05	1208200.00	4.38	987557.00	94.83

Kabupaten/Kota	Tahun	POV	UMK	TPT	JP	AMH
Semarang	2015	8.15	1419000.00	2.57	1000000.00	95.13
Temanggung	2011	13.38	779000.00	3.54	715907.00	95.96
Temanggung	2012	12.32	866000.00	3.39	714921.00	95.97
Temanggung	2013	12.42	940000.00	4.87	731911.00	95.99
Temanggung	2014	11.55	1050000.00	3.19	738915.00	92.35
Temanggung	2015	11.76	1178000.00	1.50	745000.00	95.99
Kendal	2011	14.26	843750.00	6.54	908533.00	89.31
Kendal	2012	13.17	893000.00	6.31	906292.00	89.77
Kendal	2013	12.68	953100.00	6.43	926812.00	90.23
Kendal	2014	11.80	1206000.00	5.15	934643.00	91.50
Kendal	2015	11.62	1383450.00	7.07	942000.00	93.40
Batang	2011	13.47	805000.00	6.66	713942.00	89.90
Batang	2012	12.40	880000.00	5.88	713226.00	89.93
Batang	2013	11.96	970000.00	7.02	729616.00	90.67
Batang	2014	11.13	1146000.00	7.42	736397.00	94.37
Batang	2015	11.27	1270000.00	4.56	743000.00	93.10
Pekalongan	2011	15.00	810000.00	6.91	845471.00	92.08
Pekalongan	2012	13.86	873000.00	5.08	843211.00	92.11
Pekalongan	2013	13.51	962000.00	4.78	861082.00	93.42
Pekalongan	2014	12.57	1145000.00	6.03	867573.00	96.17
Pekalongan	2015	12.84	1271000.00	5.10	873000.00	93.71
Pemalang	2011	20.68	725000.00	7.37	1264535.00	90.79
Pemalang	2012	19.28	793000.00	4.85	1257535.00	90.80
Pemalang	2013	19.27	908000.00	6.48	1279596.00	91.09
Pemalang	2014	18.44	1066000.00	7.44	1284236.00	89.58
Pemalang	2015	18.30	1193400.00	6.53	1288000.00	92.10
Tegal	2011	11.54	725000.00	10.59	1399789.00	89.47
Tegal	2012	10.75	795000.00	6.12	1390571.00	90.64
Tegal	2013	10.58	850000.00	6.89	1415009.00	91.03
Tegal	2014	9.87	1000000.00	8.47	1420132.00	94.48
Tegal	2015	10.09	1155000.00	9.52	1424000.00	92.23
Brebes	2011	22.72	717000.00	11.08	1742528.00	86.15
Brebes	2012	21.12	775000.00	8.22	1732751.00	86.69
Brebes	2013	20.82	859000.00	9.61	1764648.00	87.68
Brebes	2014	20.00	1000000.00	9.53	1773379.00	88.51
Brebes	2015	19.79	1166550.00	6.49	1781000.00	89.01
Kmagelang	2011	11.06	795000.00	11.51	118606.00	97.29
Kmagelang	2012	10.31	837000.00	8.99	117919.00	97.52

Kabupaten/Kota	Tahun	POV	UMK	TPT	JP	AMH
Kmagelang	2013	9.80	901500.00	6.75	119935.00	98.11
Kmagelang	2014	9.14	1037000.00	7.38	120373.00	96.78
Kmagelang	2015	9.05	1211000.00	6.43	121000.00	98.01
Ksurakarta	2011	12.90	826252.00	7.70	501650.00	96.71
Ksurakarta	2012	12.01	864450.00	6.29	498563.00	96.73
Ksurakarta	2013	11.74	915900.00	7.22	507825.00	96.87
Ksurakarta	2014	10.95	1145000.00	6.16	510077.00	97.62
Ksurakarta	2015	10.89	1222400.00	4.53	512000.00	97.39
Ksalatiga	2011	7.80	843469.00	9.02	173056.00	96.52
Ksalatiga	2012	7.11	901396.00	6.84	173635.00	96.55
Ksalatiga	2013	6.40	974000.00	6.21	178594.00	96.73
Ksalatiga	2014	5.93	1170000.00	4.46	181193.00	95.41
Ksalatiga	2015	5.80	1287000.00	6.43	184000.00	98.30
Ksemarang	2011	5.68	961323.00	7.65	1585417.00	96.47
Ksemarang	2012	5.13	991500.00	6.01	1599702.00	96.98
Ksemarang	2013	5.25	1209100.00	6.02	1644800.00	97.72
Ksemarang	2014	5.04	1423500.00	7.76	1672999.00	97.54
Ksemarang	2015	4.97	1685000.00	5.77	1699000.00	97.85
Kpekalongan	2011	10.04	810000.00	8.06	284413.00	95.93
Kpekalongan	2012	9.47	895500.00	7.67	284068.00	95.94
Kpekalongan	2013	8.26	980000.00	5.28	290870.00	96.24
Kpekalongan	2014	8.02	1165000.00	5.42	293704.00	98.26
Kpekalongan	2015	8.09	1291000.00	4.10	296000.00	97.69
Ktegal	2011	10.81	735000.00	9.77	240777.00	94.90
Ktegal	2012	10.04	795000.00	8.75	239428.00	94.91
Ktegal	2013	8.84	860000.00	9.32	243860.00	94.92
Ktegal	2014	8.54	1044000.00	9.20	244998.00	93.61
Ktegal	2015	8.26	1206000.00	8.06	246000.00	94.75

Keterangan :

POV = Persentase Jumlah Penduduk Miskin

UMK = Upah Minimum Kabupaten/Kota Jawa Tengah (Rupiah)

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah (Persen)

JP = Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah (Jiwa)

AMH = Angka Melek Huruf Provinsi Jawa Tengah. (Persen)

LAMPIRAN II

UJI CHOW

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	205.055080	(34,136)	0.0000
Cross-section Chi-square	692.353094	34	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: POV
Method: Panel Least Squares
Date: 01/11/17 Time: 08:16
Sample: 2011 2015
Periods included: 5
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 175

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	139.6838	23.92226	5.839070	0.0000
LOG(UMK)	-9.687172	1.785827	-5.424473	0.0000
TPT	-0.335010	0.157634	-2.125241	0.0350
LOG(JP)	2.102202	0.523890	4.012674	0.0001
AMH	-0.205881	0.098619	-2.087639	0.0383

R-squared	0.337800	Mean dependent var	13.98575
Adjusted R-squared	0.322218	S.D. dependent var	4.554672
S.E. of regression	3.749747	Akaike info criterion	5.509409
Sum squared resid	2390.303	Schwarz criterion	5.599832
Log likelihood	-477.0733	Hannan-Quinn criter.	5.546087
F-statistic	21.67997	Durbin-Watson stat	0.087325
Prob(F-statistic)	0.000000		

LAMPIRAN III

UJI HAUSMAN

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	15.435453	4	0.0039

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LOG(UMK)	-3.913310	-4.509607	0.274892	0.2554
TPT	0.105795	0.092734	0.000040	0.0391
LOG(JP)	-4.598468	2.407357	40.954760	0.2736
AMH	-0.102019	-0.113280	0.000099	0.2572

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: POV
Method: Panel Least Squares
Date: 01/11/17 Time: 08:19
Sample: 2011 2015
Periods included: 5
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 175

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	139.3187	80.72237	1.725899	0.0866
LOG(UMK)	-3.913310	0.650817	-6.012922	0.0000
TPT	0.105795	0.042084	2.513903	0.0131
LOG(JP)	-4.598468	6.471115	-0.710615	0.4785
AMH	-0.102019	0.045117	-2.261179	0.0253

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.987330	Mean dependent var	13.98575
Adjusted R-squared	0.983789	S.D. dependent var	4.554672
S.E. of regression	0.579905	Akaike info criterion	1.941677
Sum squared resid	45.73536	Schwarz criterion	2.646972
Log likelihood	-130.8968	Hannan-Quinn criter.	2.227765
F-statistic	278.8873	Durbin-Watson stat	1.475894
Prob(F-statistic)	0.000000		

LAMPIRAN IV

ESTIMASI *FIXED EFFECT*

Dependent Variable: POV
Method: Panel Least Squares
Date: 01/11/17 Time: 08:12
Sample: 2011 2015
Periods included: 5
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 175

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	139.3187	80.72237	1.725899	0.0866
LOG(UMK)	-3.913310	0.650817	-6.012922	0.0000
TPT	0.105795	0.042084	2.513903	0.0131
LOG(JP)	-4.598468	6.471115	-0.710615	0.4785
AMH	-0.102019	0.045117	-2.261179	0.0253

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.987330	Mean dependent var	13.98575
Adjusted R-squared	0.983789	S.D. dependent var	4.554672
S.E. of regression	0.579905	Akaike info criterion	1.941677
Sum squared resid	45.73536	Schwarz criterion	2.646972
Log likelihood	-130.8968	Hannan-Quinn criter.	2.227765
F-statistic	278.8873	Durbin-Watson stat	1.475894
Prob(F-statistic)	0.000000		